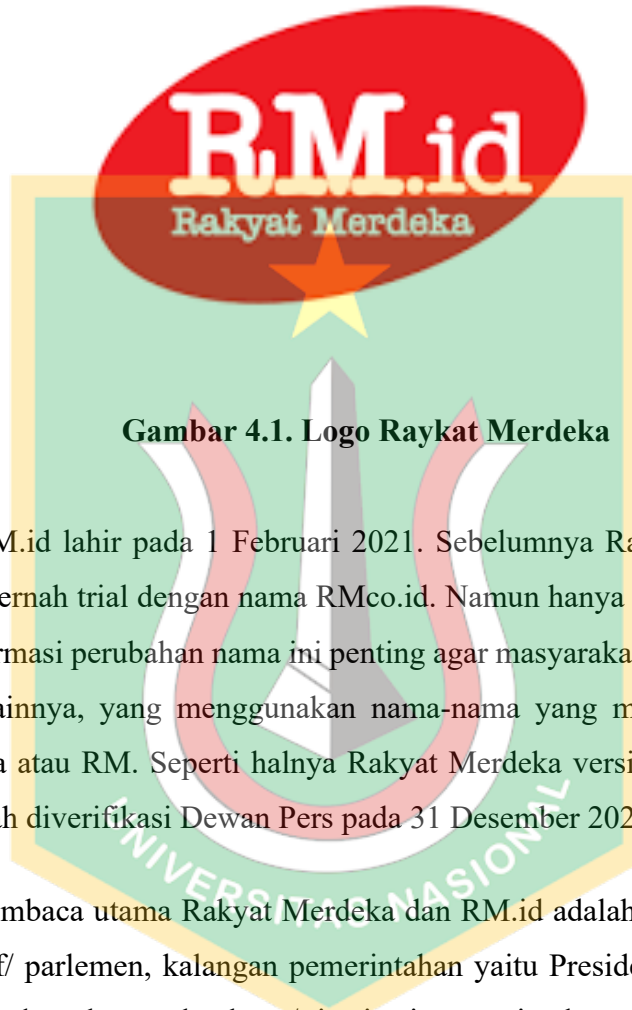


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian



**Gambar 4.1. Logo Rakyat Merdeka**

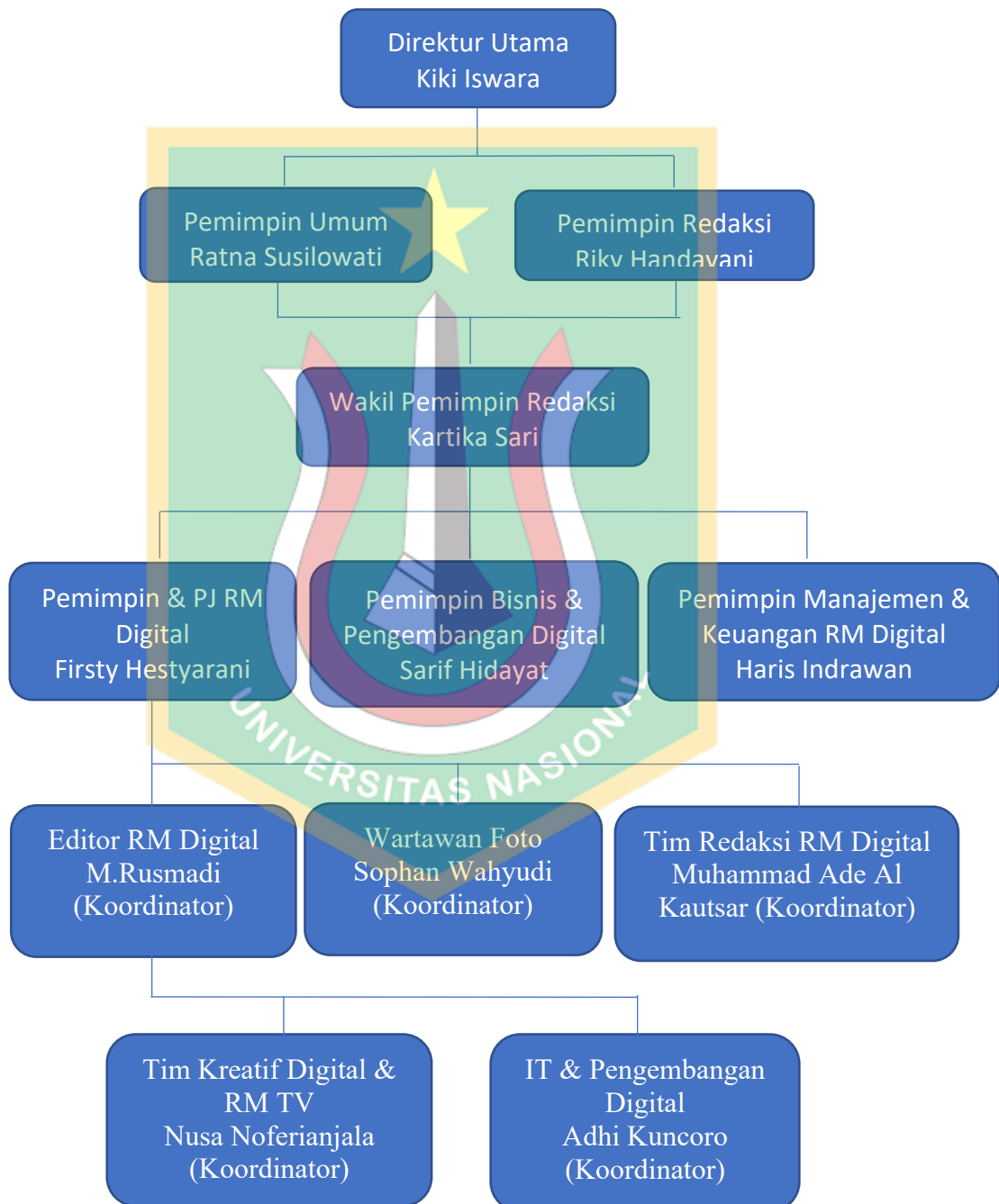
RM.id lahir pada 1 Februari 2021. Sebelumnya Rakyat Merdeka versi online pernah trial dengan nama RMco.id. Namun hanya beberapa bulan saja. Transformasi perubahan nama ini penting agar masyarakat tidak keliru dengan portal lainnya, yang menggunakan nama-nama yang mirip dengan Rakyat Merdeka atau RM. Seperti halnya Rakyat Merdeka versi cetak, maka RM.id juga telah diverifikasi Dewan Pers pada 31 Desember 2021.

Pembaca utama Rakyat Merdeka dan RM.id adalah kalangan politisi di legislatif/ parlemen, kalangan pemerintahan yaitu Presiden dan para anggota kabinet, duta besar, lembaga/ institusi pemerintahan, BUMN, pengusaha swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik, relawan dan mahasiswa. Bahasa yang ditulis Rakyat Merdeka mudah dipahami, simpel dan spontan.

Rakyat Merdeka juga terbit dalam bentuk epaper, dan bisa diakses melalui website. Sebagian besar pembaca juga menyukai tampilan Rakyat Merdeka dalam bentuk PDF, karena dianggap lebih nyaman dan mudah diakses melalui smartphone dan gadget. Koran Rakyat Merdeka versi PDF, saat ini sangat viral dan diforward setiap hari oleh banyak pembaca melalui jejaring

grup dan komunitas secara masif. Untuk yang ingin berlangganan versi tersebut, bisa mengkontak layanan marketing Rakyat Merdeka. Beralamat di Gedung Graha Pena, Lantai 8, Jl Kebayoran Lama No 12, Jakarta Selatan 12210.

### 1.1.1 Struktur Organisasi



**Tabel 4.1 Stuktur Organisasi**

## 1.2 Penyajian Data Hasil Penelitian Analisis Framing model Robert N. Entman

Peneliti akan memaparkan data yang ditemukan periode November 2023 pada E-Paper Rakyat Merdeka untuk dianalisis. Sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah yaitu bagaimana Isu politik pemilihan Presiden dipemberitaan media online melalui E-Paper Rakyat Merdeka yang dapat digunakan untuk menganalisis. Setelah memahami konsep-konsep tentang permasalahan Isu-isu Pilpres 2024, Peneliti akan menyajikan data yang didukung oleh hasil observasi *non-participan* pada E-Paper Rakyat Merdeka. Dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang sudah dijelaskan pada bab landasan Konseptual, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap 10 berita dari E-paper Rakyat Merdeka dengan menggunakan Analisis Framing Model Robert N. Entman. Pada Tabel 4.2 merupakan daftar pemberitaan yang akan dianalisis.

**Tabel 4.2 Isu PILPRES pada E-paper Rakyat Merdeka Periode Nov 2024**

No	Edisi	Segmen	Judul Berita
1	3 November 2024	<b>Otw Nyoblos</b>	Wacana KPU, Debat Capres Cawapres Digelar Di Luar Jakarta
2	5 November 2024	<b>Otw Nyoblos</b>	Program Ekonomi Hijau Calon Presiden & Calon Wakil Presiden 2024, Make or Break Masa Depan Indonesia
3	7 November 2024	<b>Cover</b>	Survei Capres Terbaru Charta Politika, Ganjar Naik, Prabowo Turun, Anies Konsisten
4	9 November 2024	<b>Cover</b>	Dukungan Prabowo-Gibran, Bobby: Semoga Aman Ini Barang, Pak...
5	11 November 2024	<b>Cover</b>	Gulirkan Panja Netralitas TNI, Banteng Senayan Ngasah Tanduk
6	11 November 2024	<b>Otw Nyoblos</b>	Tak Peduli Hasil Survei, Anies Pede Menangi Pemilu

7	23 November 2024	<b>Otw Nyoblos</b>	Luncurkan Kotak Suara Negeri, Relawan Prabowo-Gibran Bidik Gen Z & Milenial
8	27 November 2024	<b>Kontroversi</b>	Relawan Ganjar Gugat KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Capres Cawapres
9	28 November 2024	<b>Cover</b>	Kampanye Caores, No.1 Start Dari Jakarta, No.2 Start Dari Jakarta, No.3 Start Dari Papua
10	28 November 2024	<b>Otw Nyoblos</b>	Survei Bukan Hasil Pemilu Sungguhnyanya, Gerindra Nggak Terlana

Sumber : Diteliti Oleh Peneliti 2024.

Berdasarkan 10 berita di atas, maka peneliti menganalisis pada Tabel 4.2 menggunakan empat elemen framing Robert E. Nmant, dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Framing Berita 3 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka**

Media	: E-Paper Rakyat Merdeka
Segmen	: Otw Nyoblos
Judul	: Wacana KPU, Debat Capres Cawapres Digelar Di Luar Jakarta
<i>Define Problems</i>	KPU sedang mempertimbangkan perubahan dengan mengadakan debat capres-cawapres di luar Jakarta.
<i>Diagnose Causes</i>	Hal tersebut diusulkan untuk memperluas cakupan dan memungkinkan masyarakat di daerah lain lebih terlibat dalam proses pemilihan.

<i>Make Moral Judgement</i>	KPU menyiapkan adanya tim ahli khusus untuk masyarakat ditempat berlangsungnya debat terkait aspirasi dari warga sekitar.
<i>Treatment Recommendation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memilih Moderator yang Profesional dan Netral untuk debat</li> <li>- Setiap pasangan calon capres-cawapres menyertakan rencana atau gagasan konkrit mengenai pengelolaan polusi udara dalam debat.</li> </ul>

**Define problems** berita tanggal 3 November 2023, Berita yang disajikan dalam E-Paper Rakyat Merdeka mengungkapkan bahwa isu mengenai lokasi debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) merupakan salah satu topik yang sedang dipertimbangkan dengan serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selama ini, debat capres-cawapres biasanya dilaksanakan di Jakarta, yang dianggap sebagai pusat politik dan media di Indonesia. Namun, ada wacana baru yang muncul untuk mengalihkan lokasi debat ke luar Jakarta.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 1 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang membahas lokasi debat calon presiden (capres) calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024. Rencananya, adu gagasan tersebut digelar di luar Jakarta.

**Diagnose Cause.** Pada Berita ini, Dalam berita ini, terdapat wacana mengenai kemungkinan perpindahan lokasi debat calon presiden yang hingga saat ini belum mendapat kejelasan. Kejelasan tentang lokasi debat juga sangat penting untuk memastikan bahwa debat dapat dihadiri oleh jurnalis dan penonton yang relevan, serta untuk mengatur logistik seperti perlengkapan teknis dan keamanan. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk penyelenggara debat, calon presiden, dan pihak keamanan, untuk memastikan acara berlangsung dengan sukses dan

memberikan manfaat maksimal bagi pemilih. Dalam konteks ini, harapan publik adalah agar segera ada keputusan resmi terkait lokasi debat yang akan memberikan kepastian dan memfasilitasi persiapan yang efektif dari semua pihak yang terlibat.

Hal ini diperkuat pada Alinea ke 2 dan ke 3 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

"KITA (KPU) sedang diskusikan adalah tempat debat. Biasanya, semua di Jakarta. Sekarang ada wacana tidak semua di Jakarta," ujar Komisioner KPU Bidang Divisi Hukum Mochammad Afifuddin di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Afif mengatakan, opsi debat di luar Jakarta masih harus dikomunikasikan dengan masing pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres.

***Make Moral Judgment.*** Pada Berita ini, komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang merancang langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan keterlibatan publik dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang akan datang. Salah satu langkah penting yang sedang dipersiapkan adalah pembentukan tim ahli khusus yang akan ditempatkan di lokasi debat. Tim ini akan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat setempat dan penyelenggara debat, serta memastikan bahwa aspirasi dan kekhawatiran warga sekitar lokasi Debat dapat terakomodasi dengan baik dengan cara menggunakan surat. Salah satu tugas utama tim ahli adalah melakukan penelitian dan pengumpulan data mengenai isu-isu yang menjadi perhatian utama masyarakat di daerah tempat debat berlangsung.

Hal ini diperkuat pada Alinea ke 7 dan ke 8 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

"KPU akan menyiapkan tim yang akan merumuskan permasalahan seputar lingkungan hidup untuk debat capres-cawapres," katanya.

Afif mempersilakan masyarakat yang peduli pada isu lingkungan memberikan masukan dengan cara bersurat ke KPU. Nantinya, masukan itu akan diberikan kepada tim ahli sebagai perumus pertanyaan.

**Treatment Recommendation.** Pada Berita ini, memilih moderator yang profesional dan netral untuk debat presiden dan wakil presiden merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa acara tersebut berjalan dengan lancar, adil, dan informatif. Seorang moderator yang profesional dan netral tidak hanya memfasilitasi diskusi antara para calon tetapi juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk audiens dan pemirsa, mendapatkan informasi yang jelas dan berimbang.

Hal ini diperkuat pada Alinea ke 10 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Afif menambahkan, debat capres-cawapres akan dilaksanakan pada masa kampanye. Hanya saja, KPU belum menentukan secara pasti jadwal debat itu. KPU juga akan memastikan moderator debat merupakan personal yang netral.

Dalam persiapan menjelang debat calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres), setiap pasangan calon diharapkan untuk menyertakan rencana atau gagasan konkret mengenai pengelolaan polusi udara sebagai salah satu topik utama dalam diskusi tersebut. Polusi udara merupakan isu lingkungan yang sangat mendesak dan berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, serta kualitas hidup secara umum.

Hal ini diperkuat pada Alinea ke 14 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Gani menilai, isu polusi udara perlu menjadi perhatian setiap capres-cawapres. Masing-masing kandidat perlu memiliki gagasan untuk mengatasi persoalan tersebut.



Gambar 4.2 3 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka

**Komisariat Pemilihan Umum (KPU) sedang membahas lokasi debat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024. Rencananya, adu gagasan tersebut digelar di luar Jakarta.**

"KITA (KPU) sedang diskusikan adalah tempat debat. Biasanya, semua di Jakarta. Sekarang ada wacana tidak semua di Jakarta," ujar Komisioner KPU Bidang Divisi Hukum Mochammad Afifuddin di Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Afif mengatakan, opsi debat di luar Jakarta masih harus dikomunikasikan dengan masing-masing pasangan calon (paslon) capres-cawapres.

"Kalau kita usulkan ke satu kota di luar Jakarta keberatan atau tidak," ucapnya.

Yang pasti, kata Afif, jumlah debat capres-cawapres sebanyak lima kali, sama seperti Pemilu 2019. Rinciannya, tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

Selain itu, mantan komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini memastikan, isu lingkungan menjadi salah

satu tema prioritas dalam debat capres-cawapres. Saat ini, KPU sedang membahas detail teknis debat.

"KPU akan menyiapkan tim yang akan merumuskan permasalahan seputar lingkungan hidup untuk debat capres-cawapres," katanya.

Afif mempersilakan masyarakat yang peduli pada isu lingkungan memberikan masukan dengan cara bersurat ke KPU. Nantinya, masukan itu akan diberikan kepada tim ahli sebagai perumus pertanyaan.

"Terkait materi yang bisa jadi perspektif kita untuk memberikan *feeding* terhadap para tim ahli, yang nanti kita jadikan sebagai pihak untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan," jelasnya.

Afif menambahkan, debat capres-cawapres akan dilaksanakan pada

masa kampanye. Hanya saja, KPU belum menentukan secara pasti jadwal debat itu. KPU juga akan memastikan moderator debat merupakan personal yang netral.

"Moderator debat berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, dan tidak memihak kepada salah satu paslon," ungkapnya.

Peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Edbert Gani Suryahudaya menilai, komitmen sektor politik terhadap isu polusi udara masih belum memadai. Dia mengingatkan, kesadaran masyarakat mengenai isu ini semakin meningkat.

"Kepada para politisi yang mau meng-capture isu ini layak untuk diperbincangkan," kata Gani dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023).

Gani menilai, isu polusi udara perlu menjadi perhatian setiap capres-cawapres. Masing-masing kandidat

perlu memiliki gagasan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Sebagai informasi, materi debat capres-cawapres merupakan visi nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum.

Kemudian, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya, materi debat capres-cawapres diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 54 ayat 1 dan 2.

KPU juga sudah menutup masa pendaftaran capres-cawapres peserta Pilpres 2024. Total, ada tiga pasangan yang mendaftarkan. Yaitu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. ■ TIF



**Tabel 4.4 Framing Berita 5 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka**

Media	: E-Paper Rakyat Merdeka
Segmen	: Otw Nyoblos
Judul	: Program Ekonomi Hijau Calon Presiden & Calon Wakil Presiden 2024, Make or Break Masa Depan Indonesia
<i>Define Problems</i>	Indonesia sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan besar dalam transisi menuju ekonomi hijau
<i>Diagnose Causes</i>	bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal sambil mengintegrasikan upaya dekarbonisasi
<i>Make Moral Judgement</i>	mengembangkan industri hijau dan menciptakan peluang ekonomi baru
<i>Treatment Recommendation</i>	Visi dan Misi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden mencakup pertumbuhan hijau

**Define problems.** Berita tanggal 5 November 2023, Indonesia sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan besar dalam transisi menuju ekonomi hijau. Krisis iklim global yang didorong oleh emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan dekarbonisasi. Indonesia, sebagai negara dengan ketergantungan besar pada bahan bakar fosil, perlu menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan upaya dekarbonisasi. Proses ini tidak hanya melibatkan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, tetapi juga peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), yang menghadapi tantangan biaya, risiko investasi, dan keterbatasan suplai energi.

Hal ini diperkuat pada Alinea ke 3 dan ke 4 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Transisi menuju dekarbonisasi bukan sesuatu yang mudah. Mengingat, salah satu pilarnya, menggantikan sebagian porsi energi bahan bakar fosil, dengan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Namun, tak bisa dipungkiri, bahan bakar fosil masih menjadi salah satu sumber energi yang paling ekonomis dan andal mendukung pertumbuhan ekonomi. Apalagi, EBT masih menghadapi berbagai tantangan seperti biaya dan risiko investasi yang besar, serta suplai energi yang intermiten.

**Diagnose Causes.** Pada Berita ini, Indonesia menghadapi dilema ganda yang kompleks dalam merancang kebijakan ekonomi hijau. Dilema ini terletak pada bagaimana negara ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal sambil secara efektif mengintegrasikan upaya dekarbonisasi. Sebagai negara berkembang dengan PDB per kapita yang masih relatif rendah, Indonesia harus menavigasi tantangan ini dengan hati-hati, karena ada kekhawatiran bahwa fokus yang berlebihan pada dekarbonisasi dapat menghambat pencapaian tujuan ekonomi yang lebih mendasar. Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang masih signifikan dan kebutuhan mendesak untuk menciptakan lapangan kerja baru, harus memastikan bahwa upaya untuk

mengurangi emisi karbon tidak mengganggu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika terlalu banyak sumber daya dialokasikan untuk inisiatif dekarbonisasi tanpa mempertimbangkan implikasi ekonomi jangka pendek, hal ini bisa memperburuk ketimpangan ekonomi yang sudah ada dan memperlambat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 6 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Tak mudahnya menyelaraskan upaya dekarbonisasi dengan pembangunan, mengakibatkan munculnya pendapat yang menyebut, Indonesia mestinya memprioritaskan berbagai isu lain yang lebih mendasar. Seperti eradikasi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, dan pemerataan pembangunan.

***Make Moral Judgment.*** Pada Berita ini, Meskipun memiliki tantangan besar, Indonesia memiliki beberapa keunggulan kompetitif dalam ekonomi hijau, termasuk potensi besar dalam energi terbarukan dan keanekaragaman hayati. Keunggulan ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri hijau dan menciptakan peluang ekonomi baru. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini, Indonesia perlu mengubah perannya dari konsumen menjadi produsen dalam ekonomi hijau dan menghadapi tantangan dalam mengakumulasi kapabilitas industri.

Hal ini diperkuat pada Alinea ke 12, 13, dan 14 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Untuk menjadi produsen ekonomi hijau di kancah global, Indonesia sebetulnya telah memiliki beberapa keunggulan kompetitif. Pertama, Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang masif. Dari mulai potensi energi panas bumi, sinar matahari, maupun sumber daya air. Indonesia punya peluang untuk menjadi pusat pengembangan teknologi EBT dan produk "hijau" lainnya seperti green hydrogen.

Kedua, Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, mineral yang dibutuhkan untuk pengembangan industri baterai. Ketiga, Indonesia negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi nomor dua di dunia. Dengan potensi alam yang besar, Indonesia dapat mengembangkan banyak proyek ekonomi hijau berbasis hayati.

Pengembangan industri hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan bagi perekonomian Indonesia, melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru (green jobs) dan peningkatan ekspor produk hijau (green products). Terlebih lagi, kapabilitas yang didapatkan dari pengembangan industri hijau bisa dimanfaatkan mengembangkan industri lainnya.

**Treatment Recommendation.** Pada berita ini, Meskipun visi dan misi para calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum sering kali mencakup komitmen terhadap pertumbuhan hijau, tantangan nyata terletak pada kemampuan untuk mengubah komitmen tersebut menjadi strategi industrialisasi yang konkret dan berkelanjutan. Mengembangkan dan menerapkan strategi ini memerlukan langkah-langkah sistematis yang melibatkan beberapa aspek kunci, mulai dari menetapkan prioritas kapabilitas industri hingga mengimplementasikan kebijakan publik yang mendukung.

Hal ini diperkuat pada Alinea ke 23 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Siapa pun Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2024, harus dapat merancang inisiatif nyata dalam merealisasikan konsep green growth, dan memberikan dukungan kebijakan yang maksimal terhadap ekonomi hijau.



**Gambar 4.3 5 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka**

Program Ekonomi Hijau Calon Presiden & Calon Wakil Presiden 2024

## Make or Break Masa Depan Indonesia

PEMILIHAN Presiden (Pilpres) 2024 menjadi salah satu momen krusial menuju periode penting 2025-2029. Pemimpin terpilih akan menghadapi periode *make or break*, yang akan menentukan posisi Indonesia dalam peta jalan menuju negara maju.

Di tengah momentum yang penting ini, Indonesia dihadapkan tantangan krisis iklim, yang mendisrupsi perekonomian global. PBB melalui berbagai inisiatifnya, seperti United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) dan forum Conference of The Parties (COP), mendorong seluruh negara di dunia melakukan aksi dekarbonisasi. Tak terkecuali, Indonesia.

Transisi menuju dekarbonisasi bukan sesuatu yang mudah. Mengingat, salah satu pilarnya, menggantikan sebagian porsi energi bahan bakar fosil dengan Energi Baru Terbarukan (EBT). Namun, tak bisa dipungkiri, bahan bakar fosil masih menjadi salah satu sumber energi yang paling ekonomis dan andal mendukung pertumbuhan ekonomi. Apalagi, EBT masih menghadapi berbagai tantangan seperti biaya dan risiko investasi yang besar, serta suplai energi yang intermiten.

Sebagai negara berkembang

dengan PDB per kapita yang masih menempati peringkat ke-98 dunia, Indonesia menghadapi dilema ganda: mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal, sekaligus mengintegrasikan upaya dekarbonisasi.

Tak mudahnya menyelaraskan upaya dekarbonisasi dengan pembangunan, mengakibatkan permintaan atas produk dan jasa baru yang lebih "hijau" akan meningkat.

Salah satu studi Oxford Economics menyebutkan, transisi ke dunia yang lebih hijau butuh produk dan jasa yang baru dengan potensi nilai ekonomi sebesar 10 triliun Dolar AS atau sebesar 5 persen PDB dunia di tahun 2050. Untuk mengambil potensi ekonomi tersebut, suatu negara harus mempunyai peran strategis di dalam rantai nilai ekonomi hijau.

Sebagai contoh, China, produsen dari 80 persen suplai panel surya dunia, saat ini mendapatkan manfaat ekonomi yang besar dari ekspor produk EBT. Di sisi lain, negara importir panel surya, seperti Indonesia, akan semakin menggantungkan upaya dekarbonisasinya pada negara produsen. Jika Indonesia tak mampu mengubah peran dari konsumen menjadi produsen dalam ekonomi hijau, dekarbonisasi hanya

perkembangan ekonomi suatu negara.

Menurutnya, dekarbonisasi dapat mengubah lanskap perekonomian dan strategi pertumbuhan secara global. Dengan dituntutnya seluruh negara, perusahaan, maupun individu untuk melakukan dekarbonisasi, permintaan atas produk dan jasa baru yang lebih "hijau" akan meningkat.

Salah satu studi Oxford Economics menyebutkan, transisi ke dunia yang lebih hijau butuh produk dan jasa yang baru dengan potensi nilai ekonomi sebesar 10 triliun Dolar AS atau sebesar 5 persen PDB dunia di tahun 2050. Untuk mengambil potensi ekonomi tersebut, suatu negara harus mempunyai peran strategis di dalam rantai nilai ekonomi hijau.

Sebagai contoh, China, produsen dari 80 persen suplai panel surya dunia, saat ini mendapatkan manfaat ekonomi yang besar dari ekspor produk EBT. Di sisi lain, negara importir panel surya, seperti Indonesia, akan semakin menggantungkan upaya dekarbonisasinya pada negara produsen. Jika Indonesia tak mampu mengubah peran dari konsumen menjadi produsen dalam ekonomi hijau, dekarbonisasi hanya

akan dianggap sebagai beban dengan nilai tambah ekonomi yang minimal.

Untuk menjadi produsen ekonomi hijau di kancah global, Indonesia sebetulnya telah memiliki beberapa keunggulan kompetitif. Pertama, Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang masif. Dari mulai potensi energi panas bumi, sinar matahari, maupun sumber daya air. Indonesia punya peluang untuk menjadi pusat pengembangan teknologi EBT dan produk "hijau" lainnya seperti *green hydrogen*.

Kedua, Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, mineral yang dibutuhkan untuk pengembangan industri baterai. Ketiga, Indonesia negara dengan kecenderungan hayati tertinggi nomor dua di dunia. Dengan potensi alam yang besar, Indonesia dapat mengembangkan banyak proyek ekonomi hijau berbasis hayati.

Pengembangan industri hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan bagi perekonomian Indonesia, melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru (*green jobs*) dan peningkatan ekspor produk hijau (*green products*). Terlebih lagi, kapabilitas yang didapatkan dari pengembangan

industri hijau bisa dimanfaatkan mengembangkan industri lainnya.

Sebagai contoh, pengetahuan, keahlian, dan teknologi yang didapat dari pengembangan industri manufaktur baterai dapat digunakan membangun industri produk elektronik lainnya. Akumulasi berbagai kapabilitas industri baru berbasis teknologi dan sumber daya manusia, juga dapat membantu Indonesia melepaskan ketergantungan terhadap produk hulu sumber daya alam.

Jika dilihat dari visi dan misi mereka, para Capres-Cawapres mencantumkan pertumbuhan hijau dalam kerangka program kerja yang akan dilaksanakan. Namun, perlu diingat, tantangan selanjutnya, mengubah paradigma ekonomi hijau dari sekadar janji manis. Serta mengoperasionalkannya menjadi strategi industrialisasi yang konkret dan berkelanjutan.

Ada beberapa tahapan yang bisa menjadi pertimbangan para Capres-Cawapres dalam mengembangkan strategi industrialisasi hijau. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah memprioritaskan kapabilitas teknologi, jasa, atau produk "hijau" yang ingin dikembangkan. Ini bisa dimulai dengan memetakan kapabilitas industri

Indonesia saat ini. Termasuk, sumber daya alam dan manusia yang dapat mendukung pengembangan industri "hijau."

Dalam konteks ini, yang perlu dipertimbangkan adalah nilai tambah pengembangan kapabilitas tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, sejauh mana pengembangan kapabilitas tersebut dapat menjadi katalis bagi Indonesia, untuk melakukan diversifikasi ke industri lainnya.

Tahun 2023, Growth Lab Harvard University mengidentifikasi beberapa sektor prioritas dalam rantai suplai ekonomi hijau di Indonesia, yang relatif lebih mudah untuk dikembangkan dan memberikan nilai tambah yang tinggi. Hasil analisisnya menyebutkan, manufaktur baterai, *carbon capture*, komponen transmisi dan distribusi listrik, *magnet neodymium*, and semikonduktor adalah sektor yang harus diprioritaskan.

Tahapan selanjutnya adalah menyiapkan langkah strategis untuk mengakuisisi dan mengakumulasi kapabilitas, tenaga kerja, dan aset yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri prioritas tersebut.

Kebijakan publik yang tidak mengkomodifikasi akumulasi kapabilitas produksi, dapat menjadi penghambat berkembangnya sebuah industri. Memastikan transfer *knowledge* dari negara lain, pengembangan jejaring diaspora, perluasan program riset, serta *joint venture* dengan perusahaan asing adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan, untuk memastikan proses akumulasi kapabilitas.

Dengan besarnya potensi yang bisa diambil, dekarbonisasi tidak selalu berseberangan dengan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, ekonomi hijau justru dapat menjadi sumber pertumbuhan yang potensial dan penggerak pembangunan.

Siapa pun Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2024, harus dapat merancang inisiatif nyata dalam merealisasikan konsep *green growth*, dan memberikan dukungan kebijakan yang maksimal terhadap ekonomi hijau.

Mengingat masa depan kemajuan Indonesia, ditentukan dalam beberapa tahun ke depan. Memprioritaskan ekonomi hijau adalah suatu kekeniscayaan. (\*)

*Pemulis, Arafat Satria dan Novi Andriyanto, adalah dua mahasiswa Harvard Kennedy School, Harvard University, AS.*



**Tabel 4.5 Framing Berita 7 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka**

Media	: E-Paper Rakyat Merdeka
Segmen	: Halaman Utama
Judul	: Survei Capres Terbaru Charta Politika, Ganjar Naik, Prabowo Turun, Anies Konsisten
<i>Define Problems</i>	Elektabilitas calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengalami kenaikan, sementara Prabowo Subianto mengalami penurunan, sedangkan Anies Baswedan tetap konsisten berada di posisi papan bawah
<i>Diagnose Causes</i>	Dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK
<i>Make Moral Judgement</i>	Pembacaan putusan MK
<i>Treatment Recommendation</i>	Adanya teguran langsung dari Wakil Ketua MPR

**Define Problem.** Berita tanggal 7 November 2023, Dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Charta Politika setelah putusan MKMK, tampak jelas adanya perubahan dalam peta elektabilitas para kandidat. Hasil survei menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo, salah satu calon presiden, mengalami kenaikan dalam tingkat dukungan publiknya. Kenaikan elektabilitas ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh persepsi positif masyarakat terhadap sikap dan respons Ganjar Pranowo terhadap kontroversi seputar putusan MKMK, yang dinilai lebih mendekati harapan publik dibandingkan dengan para pesaingnya.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 1 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

KERASNYA kritikan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata berpengaruh pada elektabilitas Capres: Dalam survei yang dilakukan Charta Politika pasca putusan MKMK, diketahui elektabilitas Ganjar Pranowo naik, Prabowo Subianto turun, sedangkan Anies Baswedan konsisten berada di papan bawah.

**Diagnose Causes.** Pada berita ini, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden telah memicu munculnya dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan sembilan hakim MKMK. Dugaan pelanggaran ini dapat berpotensi besar mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas lembaga MKMK secara keseluruhan. Keputusan tersebut, yang diambil dalam konteks persidangan terkait syarat usia minimal untuk calon presiden dan calon wakil presiden, tampaknya telah menimbulkan berbagai kontroversi dan kritik yang meragukan kewibawaan serta keadilan lembaga ini.

Proses internal MK yang dilakukan secara tertutup, tanpa adanya keterbukaan informasi mengenai bagaimana putusan tersebut dicapai, menambah ketidakpastian di kalangan publik. Ketidakjelasan mengenai keputusan MK dan kurangnya transparansi dalam penanganan kasus etik yang melibatkan para hakim menciptakan atmosfer yang penuh dengan spekulasi. Situasi ini semakin diperburuk oleh rapat-rapat tertutup yang dilaksanakan untuk membahas masalah ini, yang mengundang berbagai spekulasi dan kecurigaan mengenai proses pengambilan keputusan yang mungkin tidak sepenuhnya objektif atau adil.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 2 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, surveinya dilakukan setelah MK mengabulkan gugatan uji materi terkait batas usia minimal menjadi Capres-Cawapres dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Senin, (16/10/2023). Putusan MK itu kemudian menuai dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim MK, atas putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Undang-Undang Pemilu tentang syarat batas minimal usia Capres-Cawapres. "Rapat internal tertutup," kata Fajar Laksono, Senin (6/11/2023).

Hal ini juga diperkuat pada Alinea Ke 4 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:



Jimly pun sebelumnya sudah memaparkan, MKMK telah menemukan bukti pelanggaran etik yang dilakukan Anwar smn dalam memutus perkara 90. Balah satunya, terlibat konflik kepentingan. Namun, Jimly belum mau blak-blakan bagaimana nasib Anwar ke depan.

***Make Moral Judgment.*** Pada Berita ini, Menanggapi rencana pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadwalkan untuk dilakukan besok Hidayat juga menekankan bahwa putusan MK yang akan dibacakan harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan ini sebagai pengawal utama pelaksanaan konstitusi. Dalam pandangannya, putusan yang tepat dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap dianggap sebagai lembaga yang kredibel dan dapat diandalkan dalam menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi dasar negara. Ia berharap agar putusan MK mampu menjawab semua keraguan publik dan memperbaiki citra lembaga tersebut di mata masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga peradilan konstitusi dapat kembali pulih dan terjaga. Menurut Hidayat Nur Wahid, hanya dengan putusan yang adil, tegas, dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang benar, MK dapat menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan keadilan. Ini akan memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki keyakinan terhadap sistem peradilan dan hukum di Indonesia, serta mendukung stabilitas dan keberlangsungan kehidupan berkonstitusi di masa depan.

Hal ini juga diperkuat pada Alinea Ke 5 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Menanggapi rencana pembacaan putusan MK, Politisi PKS Hidayat Nur Wahid berharap agar putusan MK yang akan dibacakan besok dapat menyelamatkan marwah kehidupan berkonstitusi. Dia juga berharap putusan MK itu dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan pengawal pelaksanaan konstitusi.

**Treatment Recommendation.** Pada Berita ini, Transparansi dalam proses hukum menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini melibatkan keterbukaan dalam berbagai tahap proses peradilan, mulai dari penyelidikan awal hingga putusan akhir. Proses yang terbuka dan dapat diakses oleh publik memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana keputusan dibuat, serta memberikan kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan dan kritik yang konstruktif. Keterbukaan ini juga membantu mencegah kemungkinan penyimpangan dan korupsi dalam sistem peradilan.

Selain itu, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika oleh anggota MK adalah hal yang tidak kalah penting. Penerapan sanksi yang konsisten dan berat terhadap pelanggaran etika akan menjadi langkah krusial dalam mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas lembaga peradilan di mata publik. Pelanggaran etika yang tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang memadai dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan integritas sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk tidak hanya mengimplementasikan peraturan yang ada, tetapi juga memastikan bahwa pelanggaran etika yang terjadi ditangani dengan serius dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Hal ini juga diperkuat pada Alinea Ke 6 dan ke 7 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Karena itu, Wakil Ketua MPR itu menegaskan, sewajarnya MK harus berani dengan tegas membuat putusan yang adil hingga penjatuhan sanksi kepada hakim konstitusi yang telah terbukti melakukan pelanggaran etika maupun aturan berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan Ketua MK.

"Jangan sampai putusan MK nanti malah dinilai publik sudah 'masuk angin' yang akan membuat publik semakin tidak percaya dengan hukum dan lembaga penegakan hukum, dengan segala dampak lanjutannya, termasuk

ketika MK kelak akan menangani sengketa hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presiden," tukasnya.

**Gambar 4.4 7 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka**

**Survei Capres Terbaru Charta Politika  
Ganjar Naik, Prabowo  
Turun, Anies Konsisten**

**KERASNYA** kritikan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata berpengaruh pada elektabilitas Capres. Dalam survei yang dilakukan Charta Politika pasca putusan MK, diketahui elektabilitas

Ganjar Pranowo naik, Prabowo Subianto turun, sedangkan Anies Baswedan konsisten berada di papan bawah.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yumarto Wijaya mengatakan, surveinya dilakukan setelah MK mengabulkan gugatan uji materi terkait batas usia minimal menjadi Capres-Cawapres dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Senin, (16/10/2023). Putusan MK itu kemudian memuai

LEBIH LENGKAP BERITA SURVEI SCAN QR CODE INI

♦ BERSAMBUNG KE HAL 7

## Selisih Kemenangan Prabowo Lawan Ganjar 5 Persen

### Ganjar Naik, Prabowo

... DARI HALAMAN 1

kritikan karena dicurigai untuk memberikan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming untuk maju sebagai Cawapres mendampingi Prabowo.

Survei tersebut digelar pada 26-31 Oktober 2023 dengan melibatkan 2.400 responden yang dipilih secara acak atau *multistage random sampling* di 38 provinsi. Metodenya dilakukan dengan wawancara secara tatap muka, dengan *margin of error* survei 2 persen dan tingkat kepercayaan survei 95 persen.

Apa hasilnya? Dalam simulasi tiga nama, Toto sapaan Yunato mengatakan, Ganjar keluar sebagai pemenang dan menempati urutan pertama dengan elektabilitas 36,9 persen.

"Diikuti oleh Prabowo Subianto 35,3 persen dan Anies Baswedan 24,3 persen," ungkap Toto dalam siaran persnya saat menyampaikan hasil survei, Senin (6/11/2023).

Untuk simulasi 3 nama, Toto menyebutkan, tak banyak perubahan dalam survei tersebut. Namun, saat simulasi 2 nama atau head to head, kata dia, putusan MK baru terlihat pengaruhnya.

Menurut Toto, head to head antara Prabowo vs Ganjar Pranowo saat ini tidak terlampau jauh. Bila sebelum putu-

kemenangan masih dimiliki Prabowo.

"Semula Prabowo unggul di angka 49,9 persen dan Ganjar 39,6 persen. Sekarang, elektabilitas Prabowo menjadi 44,4 persen, sedangkan Ganjar naik menjadi 40,8 persen," sebut Toto.

Bagaimana dengan Anies Baswedan? Menurut Toto, polemik yang terjadi pasca putusan MK tidak berpengaruh pada keterpilihan Anies. Capres yang diusung NasDem-PKB-PKS itu, elektabilitasnya tetap konsisten berada di peringkat ketiga dengan keterpilihan 24,3 persen. Turun sedikit dari survei sebelumnya yang memperoleh 24,8 persen.

Dalam survei kali ini, Toto juga membuat simulasi tiga nama pasangan Capres-Cawapres. Hasilnya, Prabowo yang didampingi Gibran Rakabuming Raka, kalah dari pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sebab, Ganjar-Mahfud unggul dengan elektabilitas sebesar 36,8 persen atau selisih 2 persen dari Prabowo-Gibran dengan 34,7 persen.

Kenapa Ganjar-Mahfud lebih unggul? Menurut Toto, kemenangan Ganjar-Mahfud karena adanya sentimen negatif pada pasangan Prabowo-Gibran. Kata dia, dipilihnya Gibran sebagai Cawapres kurang mendapat respons positif dari masyarakat.

Dari survei terlihat, elektabilitas Prabowo-Gibran menurun karena 49,9 responden meyakini bahwa putusan MK

Presiden Jokowi yang dianggap terlalu cawe-cawe urusan Pilpres 2023.

Selain itu, lanjut Toto, survei juga memotret penolakan masyarakat terhadap politik dinasti. Tak hanya itu, publik juga menilai bahwa Gibran belum pantas menjadi Cawapres karena masih terlalu muda dan belum berpengalaman.

"Mas Gibran ini berpotensi untuk menjadi beban atau liabilitas bagi Pak Prabowo," ungkap Toto.

Apa tanggapan purpol koalisi? Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Effendy Choirie yang mengusung pasangan Anies-Cak Imin tidak merasa resah dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, semua itu bisa berubah ketika percoblosan.

"Nggak apa-apa sekarang stagnan, semoga 14 Februari 2024 meloncat tinggi. Menang," ungkap Ketua DPP Bidang Teritorial Pememenangan Pemilu Partai NasDem ini ketika dikonfirmasi *Rakyat Merdeka*, Senin (6/11/2023).

Sementara Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra yang mengusung Prabowo-Gibran tetap percaya koalisinya mampu meraih kemenangan dalam Pilpres 2024. Wakil Komandan komunikasi (Bravo) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut, setiap lembaga survei pasti punya hasil yang berbeda. Sebab, di survei lainnya Prabowo-Gibran tetap

*margin of error*," ungkapnya kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (6/11/2023).

Ia pun optimis, dengan terbentuknya TKN, mampu memaksimalkan perolehan suara Prabowo-Gibran. "Makanya ke depan kami akan kerja keras untuk memperjuangkan kemenangan pasangan yang kami usung," tandasnya.

Sedangkan Tim Pememenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Ike Julies Tiati atau dikenal Ike Suharjo mengaku tak terkejut dengan survei yang dirilis Charta. Kata dia, saat ini memang di tingkat masyarakat banyak yang kecewa dengan putusan MK. Hal ini juga yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap MK langsung anjlok.

"Rakyat akhirnya akan memilih pemimpin yang memang berjuang untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan keluarga. Berjuang mewujudkan masyarakat lebih sejahtera menuju Indonesia unggul," ungkapnya saat dikonfirmasi.

Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo ini menambahkan, dipilihnya Mahfud MD sebagai Cawapres Ganjar Pranowo memberikan angin segar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, kepastian hukum lebih terjamin.

"Pak Mahfud itu seorang negarawan dan teladan bangsa. Bagaimana beliau mengajarkan kepada anaknya untuk tidak memanfaatkan jabatan orang tua.

**Tabel 4.6 Framing Berita 9 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka**

Media	: E-Paper Rakyat Merdeka
Segmen	: Cover
Judul	: Dukungan Prabowo-Gibran, Bobby: Semoga Aman Ini Barang, Pak...
<i>Define Problems</i>	Dukungan yang diberikan oleh Bobby Nasution, Wali Kota Medan dan menantu Presiden Jokowi, kepada pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
<i>Diagnose Causes</i>	Etika berpolitik
<i>Make Moral Judgement</i>	Sekjen PDIP meminta Bobby mundur dari PDIP

<i>Treatment</i>	Mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP
<i>Recommendation</i>	

**Define Problem.** Berita tanggal 9 November 2023, menyajikan gambaran mendalam tentang situasi politik yang sedang berlangsung dan penuh dinamika terkait dukungan Bobby Nasution kepada pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengumuman dukungan tersebut dilakukan secara resmi dalam sebuah acara besar yang diadakan di Gedung Djakarta Theater, Jakarta, pada tanggal 8 November 2023. Acara tersebut menjadi momen yang signifikan dalam lanskap politik nasional, karena tidak hanya menandai komitmen Bobby Nasution terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden dari luar partainya, tetapi juga mencerminkan potensi dampak dukungan ini terhadap dinamika politik dan aliansi yang ada. Bobby Nasution, yang sebelumnya merupakan bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengungkapkan dukungannya melalui Barisan Pengusaha Pejuang (BPP), sebuah kelompok yang dia pimpin. Dukungan ini bukan hanya sekedar deklarasi politik, tetapi juga melibatkan penyampaian pesan dan visi yang disampaikan di hadapan publik dan para pendukungnya.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 1 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

WALI Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, resmi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. PDIP pun meminta Bobby segera mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KIA).

Hal ini juga diperkuat pada Alinea ke 6 pada berita tersebut yaitu:

Bobby pun tak sungkan mencium tangan Prabowo. Kemudian, Prabowo bersama Bobby dan Rosan memasuki ruangan acara.

**Diagnose Causes.** Pada berita ini, Dukungan Bobby Nasution kepada pasangan Prabowo-Gibran menjadi penyebab utama konflik karena melawan

arahan partai PDIP yang secara resmi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Perbedaan ini menyebabkan ketegangan politik, terutama karena Bobby adalah anggota PDIP dan mengemban posisi penting dalam partai sedangkan Bobby Nasution baru saja diangkat sebagai Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang (BPP) untuk mengantarkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 3 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Bobby yang ditunjuk sebagai Ketua Umum BPP itu tiba di Djakarta Theater dengan mengenakan jaket putih dan celana jeans berwarna biru. Setibanya di lokasi, Bobby disambut meriah oleh anggota BPP.

***Make Moral Judgment.*** Pada berita ini, PDIP tidak hanya menegaskan posisi mereka dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung, tetapi juga menunjukkan komitmen partai terhadap prinsip dan arah politik yang telah ditetapkan. Tindakan Bobby yang memilih untuk mendukung pasangan calon lain dianggap bertentangan dengan keputusan partai dan arahan politik yang telah disepakati. Oleh karena itu, PDIP mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa semua anggota dan pendukung partai tetap berpegang pada visi dan misi yang sama. Pengunduran diri Bobby merupakan tindakan administratif, tetapi juga simbolis dalam menegakkan disiplin politik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan internal dan memastikan bahwa seluruh elemen partai berkomitmen penuh terhadap agenda politik dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan partai. Dengan cara ini, PDIP berharap dapat memperkuat integritas dan kesatuan internal partai dalam menghadapi dinamika politik menjelang pemilihan presiden.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 13 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

PDIP buka suara menanggapi sikap Bobby yang memilih mendukung Prabowo-Gibran. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun meminta Bobby mundur dari PDIP jika tak sesuai dengan arah partai.

**Treatment Recommendation.** Pada Berita ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara langsung merespons tindakan dukungan yang diberikan oleh Bobby Nasution kepada pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dengan mengajukan tuntutan resmi untuk pengunduran diri Bobby dari keanggotaan partai serta pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dimilikinya. Langkah ini mencerminkan kebijakan tegas PDIP dalam upaya menjaga konsistensi dan disiplin internal partai.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 15 dan ke 16 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Hasto mengaku, DPP PDIP sudah memanggil Bobby untuk meminta klarifikasi terkait dukungannya kepada Prabowo-Gibran, Senin (6/11/2023) lalu. "Kami Partai Demokrasi Indonesia yang memegang kultur demokrasi, sehingga melalui klarifikasi Pak Komarudin Watubun sudah melakukan itu dan kita tunggu dari batas waktu yang ada," ucap dia.

Dalam pertemuan itu, imbuH Hasto, DPP PDIP sudah meminta Bobby segar mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP, jika tidak mendukung Ganjar-Mahfud. "PDI Perjuangan itu kokoh dan kemudian klarifikasi sudah dilakukan ketika anggota partai, memberikan dukungan kepada calon lain kan itu suatu bentuk political disobedience," tutur Hasto.

**Gambar 4.5 9 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka**

**Dukung Prabowo-Gibran**

## Bobby: Semoga Aman Ini Barang, Pak...

<p>WALI Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, resmi mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PDIP pun meminta Bobby</p>	<p>segera mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA). Dukungan Bobby terhadap Prabowo-Gibran dideklarasikan di Gedung Djakarta Theater, Jakarta,</p>	<p>Rabu (8/11/2023). Dukungan atasnamakan Barisan Pengusaha Pejuang (BPPP). Bobby yang ditunjuk sebagai Ketua Umum BPP itu tiba di Dja-</p>	<p>karta Theater dengan mengenakan jaket putih dan celana jeans berwarna biru. Setibanya di lokasi, Bobby</p>
---	---	---	---

♦ BERSAMBUNG KE HAL 7

## Bobby: Semoga Aman Ini

... DARI HALAMAN 1

disambut meriah oleh anggota BPP.

Bobby menyalami mereka satu persatu. Termasuk Ketua Dewan Pembina BPP, Akbar Himawan Bukhari. Setelah itu, mereka memasuki ruang acara sambil menunggu kehadiran Prabowo.

Beberapa saat kemudian, Prabowo tiba dengan menumpang mobil Toyota Alphard berwarna putih dengan pelat nomor B 108 PSD. Kehadiran Prabowo yang didampingi Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani itu mendapat sambutan hangat dari Bobby cs.

Bobby pun tak sungkan mencium tangan Prabowo. Kemudian, Prabowo bersama Bobby dan Rosan memasuki ruangan acara.

Dalam sambutannya, Bobby mengatakan, siap mengantarkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. "Dalam kesempatan ini, Pak Prabowo ingin saya sampaikan dan ingin saya pastikan, kami yang berdiri dan yang duduk ataupun DPP yang ada di daerah, kami yakinkan, kami pastikan, kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak," kata Bobby.

Selain itu, Bobby menegaskan, pihaknya mendukung seluruh visi dan misi yang telah disusun pasangan Prabowo-Gibran. Menurutnya, visi dan misi Prabowo-Gibran selaras dengan komitmen BPP dalam memperjuangkan Indonesia Emas 2045.

"Kami pengusaha-pengusaha dari daerah. Selain pengusaha, kami juga pejuang yang hari ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, jadi Pak Prabowo Kalasi bahasa anak Medan-nya 'mudah-mudahan anak barang Pak,'" tegas suami Kahiyang Ayu itu.

Prabowo yang menerima dukungan dari Bobby cs itu mengucapkan terima kasih. "Saya menertana dengan penuh rasa haru dan rasa terpujinya jawab,

Usai acara, Bobby pun dikerubutin awak media. Para wartawan yang meliput penasaran bagaimana nasib Bobby di PDIP setelah memberikan dukungan ke Prabowo-Gibran.

"Saya jawab ya saya jawab, ya pokoknya barisan pengusaha pejuang siap memenangkan Prabowo-Gibran," tekan dia sembari meninggalkan kerumunan wartawan.

PDIP buka suara menanggapi sikap Bobby yang memilih mendukung Prabowo-Gibran. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun meminta Bobby mundur dari PDIP jika tak sesuai dengan arah partai.

"Karena memang etika politiknya, ketika sudah memberikan dukungan kepada pihak lain, ya bertanggung jawab untuk mengundurkan diri," tegas Hasto di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Hasto mengaku, DPP PDIP sudah memanggil Bobby untuk meminta klarifikasi terkait dukungannya kepada Prabowo-Gibran, Senin (6/11/2023) lalu. "Kami Partai Demokrasi Indonesia yang memegang kultur demokrasi, sehingga melalui klarifikasi Pak Komarudin Watubun sudah melakukan itu dan kita tunggu dari batas waktu yang ada," ucap dia.

Dalam pertemuan itu, imbu Hasto, DPP PDIP sudah meminta Bobby segar mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP, jika tidak mendukung Ganjar-Mahfud. "PDI Perjuangan itu kokoh dan kemudian klarifikasi sudah dilakukan ketika anggota partai memberikan dukungan kepada calon lain kan itu suatu bentuk *political disobedience*," tutur Hasto.

Lalu apa kata pengamat? Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai, dukungan Bobby kepada pasangan Prabowo-Gibran tidak aneh. Menurut dia, Bobby pasti akan memilih mendukung keluarganya. "Sepertinya Bobby menyerahkan KTA, biar tidak ada konflik lagi," kata-

Tabel 4.7 Framing Berita 11 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka

Media	: E-Paper Rakyat Merdeka
Segmen	: Cover



Judul	: Gulirkan Panja Netralis TNI, Banteng Senayan Ngasah Tanduk
<i>Define Problems</i>	Kurangnya dukungan dari anggota Komisi I DPR untuk usulan Panja Netralitas TNI.
<i>Diagnose Causes</i>	Penolakan di tingkat fraksi
<i>Make Moral Judgement</i>	Memastikan netralitas TNI dalam konteks Pilpres
<i>Treatment</i>	Menyampaikan Usulan di rapat Paripurna DPR
<i>Recommendation</i>	Ke-8

**Define Problem.** Berita tanggal 11 November 2023, Kurangnya dukungan dari anggota Komisi I DPR terhadap usulan Panja Netralitas TNI menjadi sorotan utama dalam beita tersebut. Usulan tersebut diajukan oleh Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, dengan tujuan untuk memastikan bahwa TNI dapat bertindak secara netral dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Meskipun niat di balik usulan ini adalah untuk menjaga integritas dan objektivitas institusi TNI dalam proses politik, ternyata usulan tersebut menghadapi tantangan signifikan dalam hal dukungan politik di kalangan anggota Komisi I.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 1 dan ke 2 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Banteng Senayan mulai ngasah tanduk. Setelah mengusulkan hak angket untuk Mahkamah Konstitusi (MK) karena menyetujui gugatan usia Capres-Cawapres, Fraksi PDIP di DPR kini menggulirkan Panja Netralitas TNI di Pilpres. Namun, sayang usulan itu sepi dukungan.

USULAN tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto di hadapan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I di Gedung DPR/ MPR, Senayan, Jakarta, Selasa lalu.

**Diagnose Causes.** Pada berita ini, Bobby juga menegaskan bahwa pembentukan Panja Netralitas TNI hanya dapat dilanjutkan jika ada bukti konkret yang mendukung klaim tentang perlunya pengawasan terhadap sikap TNI. Ia menyatakan bahwa untuk membentuk Panja tersebut, diperlukan data dan informasi yang jelas yang dapat menunjukkan adanya isu atau pelanggaran nyata yang berkaitan dengan netralitas TNI. Tanpa adanya bukti pendukung yang kuat, sulit untuk mendapatkan dukungan yang memadai dari seluruh anggota fraksi dan memastikan bahwa Panja tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti. Pernyataan Bobby ini menunjukkan bahwa, meskipun usulan Panja Netralitas TNI diajukan dengan niat baik untuk menjaga integritas pemilihan umum, proses internal di partai masih belum menunjukkan komitmen yang penuh. Tanpa adanya bukti yang meyakinkan dan dukungan yang kuat dari dalam fraksi, usulan ini berpotensi menghadapi kendala dalam pelaksanaan dan mungkin tidak akan mendapatkan perhatian yang diperlukan untuk menjadi agenda prioritas. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam membangun konsensus di antara berbagai fraksi dan anggota DPR terkait isu-isu penting yang berkaitan dengan netralitas dan integritas dalam proses politik.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 7 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Namun, sayangnya usulan itu tidak sepenuhnya disetujui Anggota Komisi I DPR lainnya. Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi menjelaskan tidak mudah menggulirkan hak angket. Butuh persetujuan dari seluruh anggota fraksi. "Kalau pembentukan Panja itu kan harus bulat dan itu belum menjadi agenda di dalam rapat internal Komisi I," ucap Bobby kepada wartawan, Jumat (10/11/2023).

**Make Moral Judgment.** Pada Berita ini, Yudo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut, menjelaskan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Panglima TNI, ia percaya bahwa semua pihak, termasuk Presiden, akan menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan

tidak akan terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak kredibilitas pemilu atau institusi negara. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa TNI tetap berada dalam posisi netral dan tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Dengan pernyataan ini, Yudo Margono berusaha menenangkan kekhawatiran publik dan pihak-pihak yang mungkin meragukan komitmen pemerintah dan TNI terhadap prinsip-prinsip hukum dan netralitas dalam pemilu. Ia berharap bahwa klarifikasi ini dapat meredakan ketegangan dan memperjelas posisi TNI serta Presiden dalam menjaga integritas dan keadilan pemilihan umum yang akan datang.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 9 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Sementara, Panglima TNI Laksamana, Yudo Margono mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan memerintahkan sesuatu hal yang melanggar hukum. Khususnya terkait Pemilu 2024. Menurutnya, Jokowi tidak mungkin juga mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. "Kan nggak mungkin. Masa Presiden memerintahkan melanggar hukum? Ya nggak lah, mana ada," ujar eks Kepala Staf 'TNI Angkatan Laut itu.

**Treatment Recommendation.** Pada Berita Ini, Masinton menjelaskan bahwa usulan hak angket ini merupakan langkah untuk menegakkan dan mempertahankan integritas konstitusi serta sistem demokrasi di Indonesia, yang menurutnya telah mengalami gangguan signifikan akibat keputusan MK tersebut. Dengan pengajuan hak angket, Masinton berharap DPR dapat menyelidiki lebih dalam dan memberikan penilaian objektif mengenai keputusan tersebut, sehingga dapat memastikan bahwa seluruh proses konstitusi dan demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip dan aturan yang ada.

Dengan langkah ini, Masinton juga ingin menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip reformasi dan demokrasi yang menjadi dasar negara, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh lembaga negara, termasuk MK, tidak mengabaikan kepentingan publik dan konstitusi. Usulan

ini, menurut Masinton, adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki dan menguatkan sistem hukum dan politik di Indonesia agar lebih efektif dan sesuai dengan harapan rakyat.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 13 dan Ke 14 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Masinton mengaku, usulannya itu tidak mewakili kepentingan partai politik maupun salah satu pasangan Capres-Cawapres. "Saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, reformasi dan demokrasi," aku dia.

Untuk merealisasikan niatnya itu Masinton mengaku sedang mengumpulkan dukungan di DPR. "Saya kontak teman-teman lintas fraksi," tukasnya.

Media	: E-Paper Rakyat Merdeka
Segmen	: Otw Nyoblos
Judul	: Tak Peduli Hasil Survei, Anies Pede Menangi Pemilu
<i>Define Problems</i>	Anies Baswedan menunjukkan keyakinan kuat untuk memenangkan Pilpres 2024 meskipun hasil survei mungkin tidak mendukung.
<i>Diagnose Causes</i>	Anies dan tim relawannya terus bekerja dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
<i>Make Moral Judgement</i>	Dukungan yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat
<i>Treatment Recommendation</i>	Tidak Disebutkan

***Define Problems.*** Berita tanggal 11 November 2023 pada segmen Otw Nyoblos, Anies Baswedan menunjukkan keyakinan yang sangat kuat untuk memenangkan Pilpres 2024, meskipun hasil survei terbaru mungkin tidak mendukungnya. Anies terus-menerus menegaskan bahwa keyakinannya didasarkan pada pemantauan langsung yang ia lakukan terhadap kondisi

masyarakat serta interaksi intensif dengan berbagai lapisan rakyat. Meskipun banyak survei menunjukkan bahwa elektabilitasnya belum mencapai posisi teratas, Anies tetap optimistis karena ia percaya bahwa hasil survei tidak selalu mencerminkan dinamika dan sentimen yang berkembang di lapangan.

Menurut Anies, realitas yang ia temui di lapangan menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan yang signifikan di kalangan rakyat terhadap kondisi saat ini. Dia percaya bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan berbagai masalah seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kurangnya lapangan pekerjaan, dan ketidakstabilan sosial yang memerlukan perhatian dan perubahan. Anies berpendapat bahwa keluhan-keluhan ini mencerminkan keinginan mendalam dari publik untuk perubahan, yang diyakininya akan menguntungkan pasangan calon yang dia usung.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 1 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Duet AMIN, relawan dan kader pendukungnya fokus bekerja menjangkau seluruh lapisan dan elemen masyarakat. Anies Baswedan justru makin optimistis, bakal memenangkan Pilpres 2024. Apalagi, dia kerap memantau kondisi masyarakat di lapangan. Banyak rakyat mengeluh dengan kondisi saat ini.

Hal ini lebih diperkuat pada Alinea Ke 3 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

“Pertanyaannya sederhana Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya terjangkau? Lapangan pekerjaan? Apa mau diteruskan. Termasuk apakah kita ingin kehidupan bernegara kita dijaga tatanannya, kehormatannya, kewibawaannya, bila iya maka jelas kita semua ingin mendorong perubahan,” ungkap Anies.

**Diagnose Causes.** Pada Berita ini, Anies juga menekankan bahwa meskipun hasil survei mungkin memberikan gambaran yang berbeda, dia dan tim relawannya tidak akan berhenti untuk bekerja keras dan terus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dia menganggap bahwa upaya dan komitmen yang

konsisten dalam berinteraksi dengan rakyat dan memahami aspirasi mereka akan menghasilkan dukungan yang lebih besar pada akhirnya.

Dengan pendekatan ini, Anies berusaha untuk mengimbangi ketidakpastian yang mungkin ditunjukkan oleh survei dengan pendekatan yang lebih personal dan terfokus pada kebutuhan serta aspirasi rakyat. Ini mencerminkan keyakinan mendalamnya bahwa kerja keras dan keterlibatan langsung akan membuahkan hasil yang positif dalam Pilpres 2024.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 4 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Di acara gathering nasional relawan Turun Tangan VIII 2023 Yogyakarta, hadir ratusan orang. Sejumlah perwakilan simpul relawan di Yogyakarta juga turut hadir dalam agenda ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memberi semangat kepada para relawannya. Dia meminta, usai acara ini, relawan punya semangat baru, energi positif, dan mulai aksi-aksi nyata di lapangan.

***Make Moral Judgment.*** Pada Berita ini, Dukungan dari elemen grassroots PPP, meskipun tidak resmi, dianggap oleh Anies sebagai tanda bahwa ada simpati atau potensi dukungan yang lebih luas di kalangan masyarakat. Namun, pengakuan bahwa baliho dukungan dari PPP tidak dikendalikan oleh pengurus resmi menunjukkan adanya kemungkinan konflik internal dalam partai tersebut atau perbedaan antara struktur pusat dan daerah.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 5 dan ke 6 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Dukungan dari berbagai elemen, juga menambah semangatnya menghadapi Pilpres 2024. Anies mengklaim, tak kaget banyak baliho PPP, partai yang berada, di koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang berisi dukungan kepada Anies-Muhaimin.

"Tidak kaget, memang banyak dari teman-teman grassroot PPP, kita sudah berinteraksi secara dekat, juga berjuang bersama. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau di Gamping, Sleman, ada baliho dukungan itu," klaim Anies.

**Treatment Recommendation.** Pada Berita ini, Tidak ditulis secara signifikan terkait treatment recommendation, namun tim Anies dan tim kampanye harus mengadakan dialog dengan pengurus PPP untuk mengklarifikasi situasi terkait baliho dukungan tidak resmi dan untuk memastikan bahwa dukungan dari elemen grassroots dipertimbangkan dengan tepat. Meskipun ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid mengaku tidak tahu mengenai baliho tersebut, penting untuk memastikan tidak ada miscommunication atau konflik internal yang dapat mempengaruhi citra kampanye.



Gambar 4.6 11 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka

# Gulirkan Panja Netralitas TNI Banteng Senayan Ngasah Tanduk



**BOS FIFA PAKE PEPI:** Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/11/2023). Jokowi memberikan pengantar-pengantar tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Gianni atas jasanya dalam bidang olahraga di Indonesia.

Banteng Senayan mulai ngasah tanduk. Setelah mengusulkan hak angkat untuk Mahkamah Konstitusi (MK) karena menyetujui gugatan usia Capres-Cawapres, Fraksi PDIP di DPR kini menggulirkan Panja Netralitas TNI di Pilpres. Namun, sayangnya usulan itu sepi dukungan.

USULAN tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto di hadapan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Selasa lalu. Mula-mula, Utut menyinggung physisi Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI. Artinya, jabatan Jokowi lebih tinggi dibanding Yudo. Utut lantas menanyakan kepada Yudo, apa bisa bersikap netral jika diperintah Jokowi untuk melakukan perkara melawan hukum mengenai pelaksanaan Pilpres. Mengingat, putra sang Jokowi yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming maju di Pilpres 2024 mendiang.

"Sungguh nggak Bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD (Jenderal Agus Subianto) sudah disurati (dari Presiden kepada DPR) bakal jadi, menurut yang saya dengar, bakal jadi calon panglima," kata Utut. Dia bilang, panglima baru calon pengganti Yudo mentalnya harus lebih siap. Apalagi dia memimpin TNI di tahun-tahun politik. "Bapak juga harus latihan, Bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi. Hari-hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," ungkapnya. Ketua DPP PDIP itu kemudian mengusulkan pembentukan panja

♦ BERSAMBUNG KE HAL 8

## Panja Netralitas TNI Belum Jadi Agenda Komisi I DPR

**Banteng Senayan**  
... DARI HALAMAN 1

netralitas TNI di Komisi I DPR. Usul tersebut sebelumnya telah diinformasikan Utut kepada pimpinan di Komisi I. "Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg kita membuat pengawasan," ucap Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Namun, sayangnya usulan itu tidak sepenuhnya disetujui Anggota Komisi I DPR lainnya. Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi menjelaskan tidak mudah menggulirkan hak angkat. Butuh persetujuan dari seluruh anggota fraksi. "Kalau pembentukan Panja itu kan harus bulat dan itu belum menjadi agenda di dalam

rapat internal Komisi I," ucap Bobby kepada wartawan, Jumat (10/11/2023).

Di internal partainya, Bobby mengaku, belum ada pembahasan terkait usulan Utut. Ia menilai Panja Netralitas TNI bisa dibuat jika ada bukti pendukung sikap TNI. Pembentukan panja harus melihat dinamika yang terjadi. Tim Panja mampu memberikan manfaat, bukan polemik di publik.

"Sehingga kita memastikan bahwa hasil Panja itu memang ada solusi, ada manfaat, tapi bukan menimbulkan polemik di publik, apalagi dalam masa persiapan pelaksanaan Pemilu," tandas Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan itu. Sementara, Panglima TNI Laksamana, Yudo Margono mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan memerintahkan sesuatu hal yang melanggar hukum. Khususnya terkait Pemilu 2024. Menurutnya, Jokowi tidak mungkin

juga mencelaikan perintah yang bertentangan dengan peraturan penundang-undangan. "Kan nggak mungkin. Masa Presiden memerintahkan melanggar hukum? Ya nggak lah, mana ada," ujar eks Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu.

Terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai usulan Utut untuk mengaktivasi fungsi pengawasan DPR yang selama ini belum berjalan optimal. "Sedangkan secara politis, agar PDIP mampu mengawal netralitas TNI jelang Pilpres sekaligus memastikan Capres-Cawapres yang diusungnya tak dirugikan," pungkas Agung.

Untuk diketahui, ini kali kedua, legislator PDIP keras terhadap Pemerintah. Sebelumnya, PDIP juga telah mewacanakan hak angkat terhadap MK, usai mengubah aturan batas usia Capres-Capres. Hak angkat tersebut

digaungkan Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu.

Masinton menyampaikan usulan itu dalam interupsi di Rapat Paripurna DPR ke-8, masa persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, Selasa (31/10/2023) lalu. Dalam interupsi tersebut, Masinton menyebut, Indonesia mengalami tragedi konstitusi usai putusan Majelis Hakim MK yang saat itu masih dipimpin Anwar Usman.

Masinton mengaku, usulannya itu tidak mewakili kepentingan partai politik maupun salah satu pasangan Capres-Cawapres. "Saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, reformasi dan demokrasi," aku dia.

Untuk merealisasikan niatnya itu, Masinton mengaku sedang mengumpulkan dukungan di DPR. "Saya kontak teman-teman lintas fraksi," tukasnya. ■ UMM



Tak Peduli Hasil Survei

# Anies Pede Menangi Pemilu

Duet AMIN, relawan dan kader pendukungnya fokus bekerja menjangkau seluruh lapisan dan elemen masyarakat. Anies Baswedan justru makin optimistis, bakal memenangkan Pilpres 2024. Apalagi, dia kerap memantau kondisi masyarakat di lapangan. Banyak rakyat mengeluh dengan kondisi saat ini.

MENURUTNYA, publik semakin bergelombang dan bergelora menginginkan perubahan. "Yang penting kita terus jalan, terus bekerja, terus menjangkau semua," ujar Anies setelah menghadiri acara gathering nasional Turun Tangan ke VIII di Grand Serela Yogyakarta, Jumat (10/11/2023).  
"Pertanyaannya sederhana.

Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya terjangkau? Lapangan pekerjaan? Apa mau diteruskan. Termasuk apakah kita ingin kehidupan bernegara kita dijaga tanahnya, keahormatannya, kewibawaannya, bila iya maka jelas kita semua ingin mendorong perubahan," ungkap Anies.  
Di acara gathering nasional relawan Turun Tangan VIII 2023

Yogyakarta, hadir ratusan orang. Sejumlah perwakilan simpul relawan di Yogyakarta juga turut hadir dalam agenda ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memberi semangat kepada para relawannya. Dia meminta, usai acara ini, relawan punya semangat baru, energi positif, dan mulai aksi-aksi nyata di lapangan. Dukungan dari berbagai elemen, juga menambah semangatnya menghadapi Pilpres 2024. Anies mengklaim, tak kaget banyak hallo PPP, partai yang berada di kuilisi Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang berisi dukungan kepada Anies-Muhaimin.  
"Tidak kaget, memang banyak

dari teman-teman grassroots PPP, kita sudah berinteraksi secara dekat, juga berjuang bersama. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau di Gamping, Sleman, ada balihod dukungan itu," klaim Anies.  
Diketahui, sebuah balihod besar PPP berisi dukungan 100 persen untuk pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) di Jalan Wates, Gamping, Yogyakarta sudah terpasang sepekan terakhir. Balihod ini pun viral di media sosial dan di pesan berantai WhatsApp. "Bismillah 2024 all in AMIN dengan gambar Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar," begitu tulisan balihod itu. Sementara Ketua DPW PPP

DIY Muhammad Yazid mengaku tak tahu menahu soal balihod dukungan kepada AMIN. Ditegaskan, DPW PPP DIY, secara resmi tak pernah spanduk tersebut. "Bukan PPP saya itu. Saya tak merasa pasang spanduk. PPP DIY belum bikin spanduk," tegas Yazid kepada wartawan, Jumat (10/11/2023).  
Pihaknya enggan mencari tahu dalam pemasangan spanduk PPP mendukung AMIN ini. Saat ini, jajarannya kini fokus ke Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2024 untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. "Kita sedang menata dan siap all in," tutur Anggota DPRD DIY ini. #FAO

Tabel 4.8 Framing Berita 23 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka

Media	: E-Paper Rakyat Merdeka
Segmen	: Otw Nyoblos
Judul	: Luncurkan Kotak Suara Negeri, Relawan Prabowo Gibran Bidik Gen Z & Milenial
<i>Define Problems</i>	Kurangnya Keterlibatan dan Dukungan dari Gen Z dan Milenial
<i>Diagnose Causes</i>	Keterbatasan dan Tantangan dalam Menggaet Dukungan dari Gen Z dan Milenial
<i>Make Moral Judgement</i>	Mengevaluasi Implikasi Etis Inisiatif dan Strategi Kampanye kotak suara
<i>Treatment Recommendation</i>	Meyakinkan para relawan dalam bekerja

**Define Problems.** Berita tanggal 23 November 2023, Relawan Penerus Negeri Prabowo-Gibran telah meluncurkan sebuah inisiatif baru bernama kotak #SuaraNegeri dengan tujuan utama untuk mengumpulkan aspirasi dan masukan dari generasi Z dan milenial. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari kelompok usia muda yang dianggap sangat penting dalam pemilihan mendatang. Peluncuran kotak #SuaraNegeri ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjangkau dan memobilisasi pemilih muda, yang sering kali

dianggap kurang terlibat dalam proses politik dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Dengan menargetkan generasi Z dan milenial, relawan berharap dapat menyalurkan aspirasi mereka secara langsung ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, sehingga menguatkan dukungan dan mempersiapkan strategi kampanye yang lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 2 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

"Target kami, akan ada jutaan suara dan aspirasi untuk Prabowo Gibran pada kotak #SuaraNegeri," kata Ketua Koordinator Nasional Penerus Negeri, M Pradana Indraputra melalui keterangan tertulisnya yang diterima Rakyat Merdeka. Rabu (22/11/2023).

**Diagnose Causes.** Pada Berita ini, Namun, meskipun tujuan dari peluncuran ini tampak positif dan ambisius, ada beberapa tantangan signifikan yang harus dihadapi untuk mencapai target yang diharapkan. Pertama-tama, ada kekhawatiran mengenai efektivitas dan jangkauan dari inisiatif ini. Meskipun relawan menetapkan target yang sangat tinggi, yaitu mendapatkan "jutaan suara dan aspirasi," belum ada data konkret mengenai sejauh mana target tersebut telah tercapai atau bagaimana aspirasi yang dikumpulkan akan diterjemahkan ke dalam strategi kampanye yang konkret.

Kedua, ada risiko bahwa upaya ini mungkin tidak mencapai dampak yang diinginkan jika tidak ada mekanisme yang jelas dan transparan untuk mengintegrasikan umpan balik dari generasi muda ke dalam strategi kampanye. Tanpa adanya kejelasan tentang bagaimana aspirasi tersebut akan diproses dan digunakan, ada kemungkinan bahwa inisiatif ini hanya menjadi simbolis belaka, tanpa memberikan kontribusi yang berarti terhadap perencanaan dan pelaksanaan kampanye.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 4 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Diakui Dana, untuk menggaet suara milenial dan gen Z harus memakai gaya kampanye dengan ciri khas anak muda. Untuk itu, berbagai program kreatif

milennial, akan digelar di 200 titik prioritas. "Saya yakin anak muda dari Aceh hingga Papua akan melirik dan memilih Prabowo-Gibran," tambahnya.

***Make Moral Judgment.*** Pada berita ini, Meskipun inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dari kelompok usia muda, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa upaya tersebut dilakukan dengan cara yang etis dan inklusif. Strategi yang terlalu fokus pada demografis tertentu atau menggunakan taktik kampanye yang mungkin tampak mengeksploitasi tren dan preferensi budaya bisa berisiko mengabaikan isu-isu yang lebih kompleks dan penting bagi pemilih muda.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 5 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Sementara Ketua Dewan Pembina Penerus Negeri, Bahlil Lahadalia menekankan, relawan Penerus Negeri harus menjadi pionir pemenangan Prabowo-Gibran di kalangan milenial dan gen Z. "Jangan hanya jadi penonton tetapi juga sebagai penggerak kesuksesan Prabowo-Gibran. Berdasarkan data KPU, 55 persen suara (pada Pemilu 2024) didominasi generasi milenial dan gen Z," ajaknya.

***Treatment Recommendation.*** Pada Berita ini, Menyarankan agar relawan mengabaikan hoaks dan fitnah dalam konteks kampanye politik bisa dianggap sebagai bentuk kelalaian etika yang serius. Dalam setiap proses pemilihan, menjaga integritas dan kejujuran informasi sangatlah penting untuk memastikan bahwa pemilih membuat keputusan berdasarkan fakta yang benar dan tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, respons yang tepat terhadap misinformasi sangat penting untuk menjaga kualitas dan keadilan pemilihan.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 8 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Menurutnya, sangat penting menjadikan Jateng lumbung suara Prabowo-Gibran. Sebab Jateng kampung halaman Gi-bran. "Kami optimistis, Mas Gibran bisa menang di kampung sendiri. Seluruh relawan, tak perlu

menanggapi hoaks dan fit-nah, cuekin dan senyumin saja, yang penting bekerja ke akar rumput," ujarnya.



**Gambar 4.7 23 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka**

Luncurkan Kotak Suara Negeri

## Relawan Prabowo-Gibran Bidik Gen Z & Milenial

RELAWAN Penerus Negeri Prabowo-Gibran meluncurkan kotak #SuaraNegeri. Gerakan ini bertujuan menyerap aspirasi generasi Z dan milenial untuk pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Target kami, akan ada jutaan suara dan aspirasi untuk Prabowo Gibran pada kotak #SuaraNegeri," kata Ketua Koordinator Nasional Penerus Negeri, M Pradana Indraputra

melalui keterangan tertulisnya yang diterima *Rakyat Merdeka*, Rabu (22/11/2023).

Dia mengajak, seluruh masyarakat, khususnya generasi pemilih muda mengakses kotak #SuaraNegeri melalui laman <https://kotaksuaranegeri.co.id/>. Aspirasi dari publik, akan tercatat dan disampaikan ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Diakui Dana, untuk menggaet suara milenial dan gen Z harus memakai gaya kampanye dengan ciri khas anak muda.

Untuk itu, berbagai program kreatif milenial, akan digelar di 200 titik prioritas. "Saya yakin anak muda dari Aceh hingga Papua akan melirik dan memilih Prabowo-Gibran," tambahnya.

Sementara Ketua Dewan Pembina Penerus Negeri, Bahlil Lahadalia menekankan, relawan Penerus Negeri harus menjadi pionir kemenangan Prabowo-Gibran di kalangan milenial dan gen Z. "Jangan hanya jadi penonton tetapi juga sebagai penggerak kesuksesan Prabowo-

Gibran. Berdasarkan data KPU, 55 persen suara (pada Pemilu 2024) didominasi generasi milenial dan gen Z," ajaknya.

Selain Relawan Penerus Negeri, relawan Bocahe Gibran Nusantara (Jateng) juga terus konsolidasi. Teranyar, konsolidasi berlangsung di Jawa Tengah. Sekretaris Jenderal Relawan Bocahe Gibran Nusantara, Yuda W.K. siap mendulang suara di kandang Banteng.

Untuk itu, pihaknya sudah melakukan sinkronisasi program dengan TKN Prabowo-Gibran.

"Seluruh program ini akan berlangsung hingga RT/RW. Salah satunya program kami Keroyok Jateng harus kita approach," tandas dia.

Menurutnya, sangat penting menjadikan Jateng lumbung suara Prabowo-Gibran. Sebab Jateng kampung halaman Gibran. "Kami optimistis, Mas Gibran bisa menang di kampung sendiri. Seluruh relawan, tak perlu menanggapi hoaks dan fit-nah, cuekin dan senyumin saja, yang penting bekerja ke akar rumput," ujarnya. ■ **FAQ**

**Tabel 4.9 Framing Berita 27 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka**

Media	: E-Paper Rakyat Merdeka
Segmen	: Kontroversi
Judul	: Relawan Ganjar Gugat KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Jadi Capres Cawapres
<i>Define Problems</i>	Relawan Pro Ganjar menggugat keputusan KPU yang menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres
<i>Diagnose Causes</i>	Ketidakpuasan dalam proses penetapan Capres-Cawapres
<i>Make Moral Judgement</i>	Pembatalan putusan KPU
<i>Treatment Recommendation</i>	Mengikuti jalur hukum yang berlaku dan menghormati hasil keputusan pengadilan

**Define Problem.** Berita tanggal 23 November 2023, Relawan Projo Ganjar menggugat keputusan KPU yang menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran

Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres. Gugatan ini didasarkan pada klaim bahwa keputusan KPU melibatkan masalah dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan syarat usia calon.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 2 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Projo Ganjar mengajukan gugatan tentang keputusan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu sudah terdaftar di PTUN, dengan Nomor 601/ G.SPPU/ 2023/PTUN. JKT.

**Diagnose Causes.** Pada berita ini, Menurut Haposan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mencopot Anwar Usman dari posisinya sebagai Ketua MK terkait putusan tersebut, yang dianggap sebagai masalah substansial. Anwar Usman dicopot dari jabatannya berdasarkan Putusan Nomor 2/MKMK/2023 tanggal 7 November 2023, karena diduga terdapat masalah dalam putusan MK mengenai syarat minimal usia untuk Capres dan Cawapres.

Anwar dijatuhi vonis pemberhentian sebagai Ketua MK oleh MKMK, dengan Putusan Nomor 2/MKMK/2023 tanggal 7 November 2023. Dengan kata lain, menurut Haposan, penetapan Prabowo-Gibran sebagai Capres-Cawapres, lahir dari cacat moril yang merusak demokrasi.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 4 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Indikasinya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK, terkait putusan MK untuk perkara Nomor 90, tentang syarat minimal usia Capres-Cawapres. Putusan ini membuat keponakan Anwar, Gibran jadi memenuhi syarat sebagai Cawapres.

**Make Moral Judgement.** Pada Berita ini, KPU harus meningkatkan transparansi dalam proses penetapan kandidat, termasuk publikasi keputusan dan alasan yang mendasarinya. Hal ini dapat membantu mengatasi ketidakpercayaan publik dan memastikan bahwa proses pemilihan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara moral oleh masyarakat.

Penjelasan mengenai bagaimana keputusan MK mempengaruhi kualifikasi kandidat juga harus disampaikan secara jelas.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 7 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Untuk itu, Haposan meminta pembatalan penetapan KPU tentang keikutsertaan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. "Karena, proses penerbitan objek gugatan, cacat formil dan substansial," ucap Haposan.

***Treatment Recommendation.*** Pada berita ini, Seluruh tim kampanye, termasuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan tim pendukung Ganjar-Mahfud, harus tetap fokus pada substansi kampanye dan program yang ditawarkan kepada pemilih. Alih-alih terjebak dalam perdebatan hukum dan gugatan, lebih baik untuk memprioritaskan dialog yang konstruktif dan menyampaikan visi dan misi secara jelas kepada publik. Penting bagi semua pihak untuk berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang adil selama proses ini berlangsung.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 9 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

"Yang dilakukan teman-teman Projo pendukung Ganjar, melapor ke PTUN itu, sah-sah saja," ujarnya.

Hal ini diperkuat lagi pada Alinea Ke 11 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

"Mungkin mereka panik. Makanya, mereka akan melakukan apa pun yang mereka bisa lakukan. Kami lebih baik fokus memenangi hati rakyat. Itu lebih penting," katanya.



Gambar 4.8 27 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka

## Relawan Ganjar Gugat KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Jadi Capres-Cawapres

Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres, dipersoalkan organisasi yang menamakan diri Pro Jokowi (Projo) Ganjar.

Projo Ganjar mengajukan gugatan tentang keputusan KPU itu, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu sudah terdaftar di PTUN, dengan Nomor 601/ G.SPPU/ 2023/ PTUN. JKT.

Ketua Umum Relawan Projo Ganjar, Haposan Situmorang mengatakan, dasar gugatan ini adalah, penetapan Prabowo-Gibran sebagai Capres-Cawapres oleh KPU, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bermasalah.

Indikasinya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK, terkait putusan

MK untuk perkara Nomor 90, tentang syarat minimal usia Capres-Cawapres. Putusan ini membuat keponakan Anwar, Gibran jadi memenuhi syarat sebagai Cawapres.

Anwar dijatuhi vonis pemberhentian sebagai Ketua MK oleh MKMK, dengan Putusan Nomor 2/MKMK/2023 tanggal 7 November 2023.

Dengan kata lain, menurut Haposan, penetapan Prabowo-Gibran sebagai Capres-Cawapres, lahir dari cacat moril yang merusak demokrasi.

Untuk itu, Haposan meminta pembatalan penetapan KPU tentang keikutsertaan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. "Karena, proses penerbitan objek gugatan, cacat formil dan substansial," ucap Haposan.

Gugatan yang dilayangkan Haposan, mendapatkan dukungan

dari Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Kris Tjantra. Menurutnya, penetapan Prabowo-Gibran sebagai Capres-Cawapres, memang ada kesalahan.

"Yang dilakukan teman-teman Projo pendukung Ganjar, melapor ke PTUN itu, sah-sah saja," ujarnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Silfester Matutina mencium ada aroma takut kalah menjelang Pilpres 2024.

"Mungkin mereka panik. Makanya, mereka akan melakukan apa pun yang mereka bisa lakukan. Kami lebih baik fokus memenangi hati rakyat. Itu lebih penting," katanya.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Silfester Matutina dan Kris Tjantra, mengenai laporan Projo Ganjar ke PTUN itu.





**Tabel 4.10 Framing Berita 28 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka**

Media	: E-Paper Rakyat Merdeka
Segmen	: Cover
Judul	: Kampanye Pemilu 2024 dimulai hari ini, Diatas sudah damai, di bawah harus rukun.
<i>Define Problems</i>	Muncul masalah dalam konteks pelaksanaan kampanye pemilu
<i>Diagnose Causes</i>	Kekhawatiran/Keraguan Capres-Cawapres
<i>Make Moral Judgement</i>	Kepercayaan masing-masing kandidat pada BAWASLU
<i>Treatment Recommendation</i>	Menghimbau peserta Pemilu

**Define Problems.** Berita tanggal 28 November 2023 pada Cover, Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, memilih untuk memulai kampanye mereka di lokasi yang berbeda, dengan Anies memulai di Jakarta dan Muhaimin di Surabaya. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memulai kampanye mereka dari Jakarta, dan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memulai kampanye mereka di Papua. Perbedaan dalam lokasi awal kampanye ini berpotensi menimbulkan beberapa masalah signifikan.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 2 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, akan berbagi tugas dalam kampanye hari pertama ini. Ke-duanya akan berkampanye di tempat berbeda. Anies akan menggelar kampanye pertamanya di Jakarta. Sementara Imin, sapaan akrab Mu-haimin, akan memulai kampanye di wilayah Surabaya.

"Kami dari Jakarta, nanti Gus Imin dari Surabaya," kata Anies, di Kantor KPU. Jalan Imam Bonjol, Menteng. Jakarta, Senin (27/11/2023).

**Diagnose Causes.** Pada Berita ini, Terdapat kekhawatiran mengenai kecurangan dalam pemilu, yang disampaikan oleh Anies Baswedan, dan adanya potensi hoaks yang bisa merusak integritas pemilu. Kecurangan dan misinformasi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan berdampak negatif pada hasil pemilu.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 15 dan Ke 16 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Diawali oleh Anies. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menyinggung soal ramainya pemberitaan mengenai adanya kecurangan di Pemilu 2024. Anies bilang, baru kali ini kecurangan Pemilu ramai disuarakan masyarakat. "Saya rasa Bawaslu menyaksikan, di pemilu-pemilu sebelumnya

tidak banyak orang membicarakan netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran," sebut Anies.

Menurut Anies, banyaknya pembicaraan soal kecurangan menandakan penurunan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, dia mengingatkan, Bawaslu agar mengembalikan kepercayaan publik.

***Make Moral Judgment.*** Pada berita ini, Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggara Pemilu, aparat penegak hukum, maupun peserta Pemilu, memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan pemilihan yang bersih dan kredibel. Ganjar Pranowo mengungkapkan keyakinannya bahwa seluruh penyelenggara Pemilu akan menjalankan pakta integritas yang telah ditandatangani oleh semua peserta Pemilu. Diharapkan bahwa seluruh peserta Pemilu dan pihak-pihak terkait dapat bekerja sama secara harmonis untuk mewujudkan pemilihan yang tidak hanya sah dan adil, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 19 dan Ke 20 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

"Kami percaya, kami yakin penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini, dan akan menyelenggarakan Pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih," tegas ketua umum Gerindra itu.

Itu mengajak semua pihak untuk berupaya melaksanakan Pemilu 2024 secara adil dan bersih. Ganjar meyakini, seluruh penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh peserta Pemilu. "Apa yang tadi dibacakan, ditorehkan dalam tanda tangan komitmen adalah sebuah ungkapan keseriusan, dari pikiran hati dan tindakan kita," tegas Ganjar.

***Treatment Recommendation.*** Pada Berita ini, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memberikan penilaian mendalam mengenai

pentingnya agenda ini untuk mengedukasi dan menyadarkan publik tentang komitmen yang dipegang oleh seluruh peserta Pemilu, termasuk pasangan Capres-Cawapres. Menurutnya, agenda ini bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi merupakan langkah krusial untuk menegaskan keseriusan para peserta dalam menjaga dan memastikan Pemilu berlangsung dengan damai. Dalam konteks Pemilu 2024, prioritas utama yang harus diutamakan adalah arahan dari para elite politik untuk mengedepankan pendekatan politik yang santun, damai, dan penuh riang. Agung Baskoro menegaskan bahwa jika para elite politik, yang menjadi panutan masyarakat, telah menyatakan dukungan mereka untuk penyelenggaraan Pemilu yang damai, maka seharusnya hal tersebut menjadi contoh yang dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

Agung menekankan pentingnya agar Pemilu tidak diwarnai oleh hoax, berita palsu, dan narasi kebencian yang bisa merusak integritas dan ketertiban pemilihan. Menurutnya, semua pihak baik para peserta Pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa proses demokrasi ini berlangsung dengan penuh rasa tanggung jawab, menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan, dan menjaga sikap serta komunikasi yang konstruktif. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis selama periode Pemilu, demi terwujudnya hasil pemilihan yang adil dan mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 22 dan 23, 24 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai, agenda ini penting untuk menyadarkan publik bahwa peserta Pemilu, termasuk Capres-Cawapres komitmen menjaga Pemilu damai. Dalam konteks 2024, arahan elite untuk mengedepankan politik santun, damai, dan riang menjadi prioritas.

"Jika para elite saja sudah menyatakan mendukung pemilu damai, maka arus bawahnya juga harus bisa rukun," ujar-nya kepada Rakyat Merdeka. Senin (27/11/2023).

Menurut dia jangan sampai pemilu diwarnai dengan hoax dan narasi kebencian. Menurut dia semua pihak harus bisa.

Media	: E-Paper Rakyat Merdeka
Segmen	: Otw Nyoblos
Judul	: Survei Bukan Hasil Pemilu Sungguhnya, Gerindra Nggak Terlana
<i>Define Problems</i>	Partai Gerindra menunjukkan kewaspadaan terhadap hasil survei
<i>Diagnose Causes</i>	Hasil survei
<i>Make Moral Judgement</i>	Survei hanya memberikan gambaran sementara dan dapat berubah hingga hari pemilihan.
<i>Treatment Recommendation</i>	Memperkuat kampanye

**Define Problems.** Berita tanggal 28 November 2023 pada ssegmen Otw Nyoblos, Partai Gerindra menunjukkan kewaspadaan terhadap hasil survei yang menempatkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang survei. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa meskipun hasil survei menunjukkan keunggulan Prabowo-Gibran, hal ini tidak boleh membuat partai koalisi dan relawan terlana. Ada kekhawatiran bahwa hasil survei dapat memicu sikap jumawa atau kurangnya kerja keras karena menganggap kemenangan sudah hampir pasti.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 4 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

"Kami ingatkan kepada se-luruh partai koalisi pendukung dan simpatisan Prabowo-Gibran. jangan sampai itu meninabobokan kita. Karena ini hasil survei. bukan hasil pemilu yang sesungguhnya," kata Muzani.

**Diagnose Causes.** Pada Berita ini, Hasil survei menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran memimpin dengan 43% dibandingkan dengan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mendapatkan 26,1% dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang meraih 22,7%. Namun, survei hanya memberikan gambaran sementara dan dapat berubah hingga hari pemilihan.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 7 dan 8 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Sebelumnya, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali unggul di bursa Pilpres 2024. Kali ini, Survei dan Polling Indonesia (SPIN) mencatat pasangan nomor urut 2 ini meraih 43 persen dari kompetitor.

"Pasangan Calon Prabowo-Gibran tampil sebagai pemenang dalam pertarungan tiga pasangan. Catatannya, 43 persen publik akan memilih pasangan ini," ujar Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara, saat merilis hasil survei secara daring. Senin (27/11/2023).

**Make Moral Judgemen.** Pada berita ini, Sebagai peringatan yang sangat penting Muzani mengimbau kepada semua partai koalisi yang mendukung, serta seluruh relawan pendukung pasangan Prabowo-Gibran, agar tidak merasa puas atau lengah dengan hasil survei yang ada saat ini. Beliau meminta agar mereka terus-menerus bekerja keras dan secara konsisten melakukan upaya untuk meyakinkan masyarakat di setiap kota, desa, dan komunitas tempat tinggal masing-masing. Penting untuk memastikan bahwa pemilih di berbagai daerah memahami dan menganggap pasangan nomor 2, Prabowo-Gibran, sebagai pilihan terbaik yang layak dipilih dalam Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun depan. Upaya ini harus dilakukan

tanpa henti untuk memastikan bahwa seluruh potensi dukungan dapat direalisasikan pada hari pemilihan, sehingga pasangan Prabowo-Gibran dapat meraih kemenangan yang diharapkan.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 6 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

"Sekali lagi kami anjurkan kepada semua partai koalisi, semua relawan pendukung Prabowo-Gibran agar tetap bekerja keras yakinkan masyarakat di kota, di desa, di tempat tinggal masing-masing untuk menjadi-pilihan nomor 2 pasangan Prabowo-Gibran sebagai pilihan terbaiknya yang akan dipilih 14 Februari tahun depan," katanya.

***Treatment Recommendation.*** Pada Berita ini, Meski survei mengindikasikan bahwa Prabowo-Gibran memiliki dukungan yang signifikan dari berbagai generasi, tidak ada jaminan bahwa dukungan tersebut akan tetap konsisten hingga hari pemilihan. Oleh karena itu, penting bagi Gerindra untuk terus memperkuat kampanye mereka dan memastikan bahwa semua dukungan yang diperoleh dari survei akan terwujud dalam bentuk suara pada hari pemilihan.

Hal ini diperkuat pada Alinea Ke 11 yang tertulis pada berita tersebut yaitu:

Bahkan, Survei SPIN juga turut menganalisa jika terjadi Pilpres dua putaran, yang akan bertarung hanya tersisa pasangan calon Prabowo-Gibran versus Anies-Muhaimin.

Gambar 4.9 28 Nov 2023 E-Paper Rakyat Merdeka

# Kampanye Pemilu 2024 Dimulai Hari Ini Di Atas Sudah Damai Di Bawah Harus Rukun



DEKLARASI DAMAI: Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) beserta ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menandatangani naskah Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (27/11/2023).

### Kampanye Capres No. 1 Start Dari Jakarta No. 2 Start Dari Jakarta No. 3 Start Dari Papua

MULAI hari ini, Selasa (28/11/2023) sampai Sabtu (10/2/2024), para Capres-Cawapres akan melakukan kampanye terbuka. Mereka mulai memasarkan diri untuk menarik simpati publik. Ada yang start dari Jakarta, ada juga yang dari Merak, Papua.

Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, akan berbagi tugas dalam kampanye hari pertama ini. Keduanya akan berkampanye di tempat berbeda. Anies akan menggelar kampanye perjalanannya di Jakarta. Sementara itu, sapaan akrab Muhaimin, akan memulai kampanyenya di wilayah Surabaya.

"Kami dari Jakarta, nanti Gus Imin dari Surabaya," kata Anies, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng,

Jakarta, Senin (27/11/2023).

Pembagian wilayah kampanye dimaksudkan untuk memperluas jangkauan. Sebab, kata Anies, kampanye yang dilakukan secara bersamaan kurang efektif untuk menjangkau wilayah-wilayah yang diprioritaskan. "Kalau semuanya bareng, nanti yang bisa terjangkau sedikit," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkapkan, kampanyenya akan membawa satu pesan utama, yakni mewujudkan keadilan. "Salah satu dari dulu kita kampanye, satu pesan utama, melahirkan keadilan. Visinya Indonesia adil-makmur untuk semua," jelas Anies.

Capres-Cawapres nomor urut 2,

• BERSAMBUNG KE HAL 7

# Capres-Cawapres Komit Ciptakan Pemilu Damai

Di Atas Sudah Damai ... DARI HALAMAN 1

Muhaimin Iskandar menjadi peserta Pemilu yang datang pertama. Cawapres Anies Baswedan ini tiba pukul 08.48 WIB. Cak Imin-sapaan akrabnya-terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang, dibalut jas berwarna hitam dan peci warna senada. Cak Imin tidak datang sendirian. Dia ditemani sejumlah elite PKB.

Beberapa menit kemudian, Capres no urut 1, Anies Baswedan datang menyusul. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tiba dengan mengenakan seragam yang persis seperti Cak Imin. Anies juga ditemani elite parpol pengusung.

Cak Imin sempat berbicara dengan media. Dia bilang, ini momen paling penting dalam Pemilu karena menandai dimulainya kampanye. "Mari kita yakinkan masyarakat dengan gagasan program dan rencana-rencana penting," kata Cak Imin sebelum memasuki ruang utama acara.

Setelah itu, giliran pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang datang. Keduanya datang tidak secara bersamaan. Mahfud datang terlebih dulu. Dia tiba pukul 08.56 WIB. Mahfud mengenakan setelan kemeja putih lengan panjang dengan celana bahan berwarna hitam.

Beberapa saat setelahnya, giliran

Ganjar menyusul. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tampil beda dengan Mahfud. Ganjar memilih mengenakan kemeja hitam dan celana warna cokelat muda. Ganjar kemudian naik tangga ke tempat acara yang ada di lantai dua.

"Mari olahraga," singkat Ganjar ketika ditanya wartawan kenapa memilih tangga ketimbang eskalator untuk menuju ruang acara.

Terakhir giliran pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya tiba secara bergantian sekitar pukul 09.10 WIB. Diawali oleh Gibran, lalu Prabowo. Keduanya kompak mengenakan kemeja biru.

Usai semuanya dipastikan hadir, para Capres-Cawapres dan perwakilan partai politik diminta untuk menaiki panggung utama. Di momen ini, mereka serempak membacakan naskah deklarasi yang isinya komitmen untuk mewujudkan Pemilu 2024 secara damai. Pembacaan naskah ini dipandu oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Setelah itu disusul dengan penandatanganan nota kesepakatan kampanye pemilu damai 2024. Dalam kesempatan ini juga, para Capres-Cawapres diberikan waktu untuk memberikan kalimat sambutan.

Diawali oleh Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu me-

nyinggung soal rumahnya pemberitaan mengenai adanya kecurangan di Pemilu 2024. "Anies bilang, baru kali ini kecurangan Pemilu ramai disuarakan ke masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikan, di pemilu-pemilu sebelumnya tidak banyak orang membicarakan netralitas, membicarakan tentang ketidaksihajaran," sebut Anies.

Menurut Anies, banyaknya pembicaraan soal kecurangan menandakan penurunan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, dia mengingatkan, Bawaslu agar mengembalikan kepercayaan publik.

"Kita harus buktikan dengan jawaban netralitas, jawaban dengan konsistensi atas apa yang ditandatangani, atas yang dikatakan undang-undang dilaksanakan sepenuhnya di lapangan," warning mantan rektor Universitas Paramadina itu.

Selanjutnya giliran Prabowo. Dia menilai, seluruh rakyat Indonesia mendukung penyelenggaraan Pemilu yang bersih, transparan, dan tanpa kecurangan apapun. Menteri Pertahanan itu yakin Bawaslu bisa menghadirkan iklim demokrasi yang didambakan rakyat.

"Kami percaya, kami yakin penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini, dan akan menyelenggarakan Pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih," tegas Ketua Umum Gerindra itu.

Terakhir giliran Ganjar. Kader PDIP

itu mengajak semua pihak untuk berupaya melaksanakan Pemilu 2024 secara adil dan bersih. Ganjar meyakini, seluruh penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan pakta integritas yang telah ditandatangani seluruh peserta Pemilu. "Apa yang tadi dibacakan, ditorehkan dalam tanda tangan komitmen adalah sebuah ungkapan keseriusan, dari pikiran hati dan tindakan kita," tegas Ganjar.

Menurutnya, penandatanganan deklarasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen KPU-Bawaslu dalam menjalankan Pemilu dengan baik. "Kami sangat percaya seluruh penyelenggara Pemilu dan aparat akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh," ucap dia.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Basukoro menilai, agenda ini penting untuk menyadarkan publik bahwa peserta Pemilu, termasuk Capres-Cawapres komitmen menjaga Pemilu damai. Dalam konteks 2024, arahan elite untuk mengedepankan politik santun, damai, dan riang menjadi prioritas.

"Jika para elite saja sudah menyatakan mendukung pemilu damai, maka arus bawahnya juga harus bisa rukun," ujarnya kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (27/11/2023).

Menurut dia, jangan sampai pemilu dipenuhi oleh hoax dan narasi kebencian. Menurut dia, semua pihak harus bisa menjaga pemilu dengan damai. ■ UMM



## Survei Bukan Hasil Pemilu Sesungguhnya Gerindra Nggak Terlenna

**Partai Gerindra tak mau terlenna meski duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi langganan juara di bursa hasil survei soal capres-cawapres. Capaian itu untuk memicu semangat.**

PARTAI Gerindra tak mau terlenna meski duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi langganan juara di bursa hasil survei soal capres-cawapres. Capaian itu untuk memicu semangat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak juma dengan tren positif jagoannya di bursa Pilpres 2024. Muzani meminta partai koalisi dan relawan pendukung tidak terlenna atas hasil survei tersebut. "Kami ingatkan kepada seluruh partai koalisi pendukung dan simpatisan Prabowo-Gibran, jangan sampai itu meminabobokan kita. Karena ini hasil survei, bukan hasil pemilu yang se-

sungguhnya," kata Muzani.

Menurutnya, hasil Pemilu sesungguhnya baru akan terlihat saat hari pencoblosan 14 Februari 2024. Hasil survei yang ada saat ini menjadi penyemangat kerja pemenangan Prabowo-Gibran untuk satu putaran.

"Sekali lagi kami ajarkan kepada semua partai koalisi, semua relawan pendukung Prabowo-Gibran agar tetap bekerja keras yakinkan masyarakat di kota, di desa, di tempat tinggal masing-masing untuk menjadikan pilihan nomor 2 pasangan Prabowo-Gibran sebagai pilihan terbaiknya yang akan dipilih 14 Februari tahun depan," katanya. Sebelumnya, pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali unggul di bursa Pilpres 2024. Kali ini, Survei dan Polling Indonesia (SPIN) mencatat paslon nomor urut 2 ini meraih 43 persen dari kompetitornya.

"Pasangan Calon Prabowo-Gibran tampil sebagai pemenang dalam pertarungan tiga paslon. Catatannya, 43 persen publik akan memilih pasangan ini," ujar Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara, saat merilis hasil survei secara daring, Senin (27/11/2023).

Di dalam rilis survei teranyarnya itu, SPIN mencatat di posisi kedua ditempati paslon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan dipilih responden sebanyak 26,1 persen. Ada setisih sebesar 16,9 persen antara Prabowo-Gibran dengan Ganjar Mahfud.

Sementara, duet Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar, meraih 22,7 persen.

Menurutnya, duet Ganjar Mahfud bisa dikatakan mengalami kondisi yang stagnan dan semakin tertinggal jauh. Bahkan, survei SPIN juga menyatakan berpotensi disalip pasangan calon Anies-Muhaimin.

Bahkan, Survei SPIN juga turut menganalisa jika terjadi Pilpres dua putaran, yang akan bertarung hanya tersisa pasangan calon Prabowo-Gibran versus Anies-Muhaimin.

Survei SPIN juga mengungkap data perihal persebaran elektabilitas dari lintas generasi terhadap pasangan Capres-Cawapres. Hasilnya, Prabowo-Gibran menjadi favorit dari lintas generasi. Dimulai dari Gen Z, Gen Y (Milenial) dan Gen X.

"Pasangan calon Prabowo-Gibran mendapat dukungan ter-

besar dari generasi muda Z 48,4 persen, Y (Milenial) 48,5 persen dan X 40,7 persen," papar Igor. Diketahui, sebanyak 56,9 persen DPT Pemilu 2024 mayoritas diisi Gen Z dan Gen Y sehingga sangat tepat bagi Prabowo menunjukkan komitmennya mengakomodir Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya yang mewakili generasi muda.

Survei ini dilakukan periode 1-10 November 2023 dengan wilayah sebaran sampel tersebar di 38 Provinsi di Seluruh Indonesia.

Adapun, jumlah sampel sebanyak 2178 responden dilakukan dengan teknik sampel *Multi-stage Random Sampling* dibantu dengan Bantuan Kuisi. *Margin of Error* survei ini kurang lebih 2,1 persen dengan Level of Confidence sebesar 95 persen. ■ BSH

### 1.3 Pembahasan

Pada E-Paper Rakyat Merdeka sebagai subjek pada penelitian ini, penulis mengamati dan juga melakukan analisis terhadap pembingkaihan (*framing*) yang dilakukan oleh media online tersebut, saat memberitakan terkait dengan objek pada penelitian ini, yaitu berita Isu Pemilihan Presiden 2024 periode November. E-Paper Rakyat Merdeka turut berpartisipasi dalam menyajikan berita terkait Isu Pemilihan Presiden 2024.

Setelah dilakukan analisis pada berita – berita terkait dengan berita Isu Pemilihan Presiden 2024 periode November lalu yang dimuat oleh E-Paper Rakyat Merdeka. Berita yang dianalisis dari media tersebut, tergolong pada jenis berita ‘Hard news’ dimana, hard news itu sendiri merupakan sebuah berita yang menyampaikan informasi/ peristiwa terkait dengan kepentingan nasional dan juga kepentingan khalayak luas.

Setelah melakukan analisis *framing*, penulis juga akan melakukan pembingkaihan yang dilakukan E-Paper Rakyat Merdeka dalam menyajikan isu Dinasti Politik Jokowi periode November 2023. Oleh karena itu, penulis melakukan pembingkaihan yang dilakukan oleh E-Paper Rakyat Merdeka

dengan melakukan analisis *framing* menggunakan model dari Robert N. Entman.

Jika melihat pada teori Agenda Setting , yaitu teori agenda setting menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Media dapat menentukan isu-isu yang dapat menjadi perhatian publik melalui frekuensi dan cara penyajian berita.

Dari hasil penelitian yang telah penulis analisis, terlihat bahwa E-Paper Rakyat Merdeka lebih cenderung memberikan pemberitaan yang Objektif terhadap isu Pemilihan Presiden 2024 periode November 2023. Hal ini dapat menunjukkan bahwa E-Paper Rakyat Merdeka mengambil posisi kritis dan menyampaikannya secara Objektif terhadap fenomena tersebut.

Dalam hal ini dapat dikonfirmasi terkait isu Pilpres pada Rakyat Merdeka yaitu:

1. Pemilihan Isu: E-Paper Rakyat Merdeka secara konsisten mengangkat topik Pilpres 2024, yang menunjukkan bahwa media ini menganggap isu tersebut sangatlah penting untuk dibahas.
2. Framing: Dengan secara Objektif, E-Paper rakyat merdeka membingkai isu ini sebagai sesuatu yang negatif atau patut dikritisi.
3. Frekuensi: Jika pemberitaan tentang isu ini sering muncul, maka hal ini semakin memperkuat agenda setting yang dilakukan.
4. Pengaruh pada Opini Publik: Pemberitaan yang cenderung kontra dapat mempengaruhi persepsi pembaca terhadap isu pemilihan Presiden.

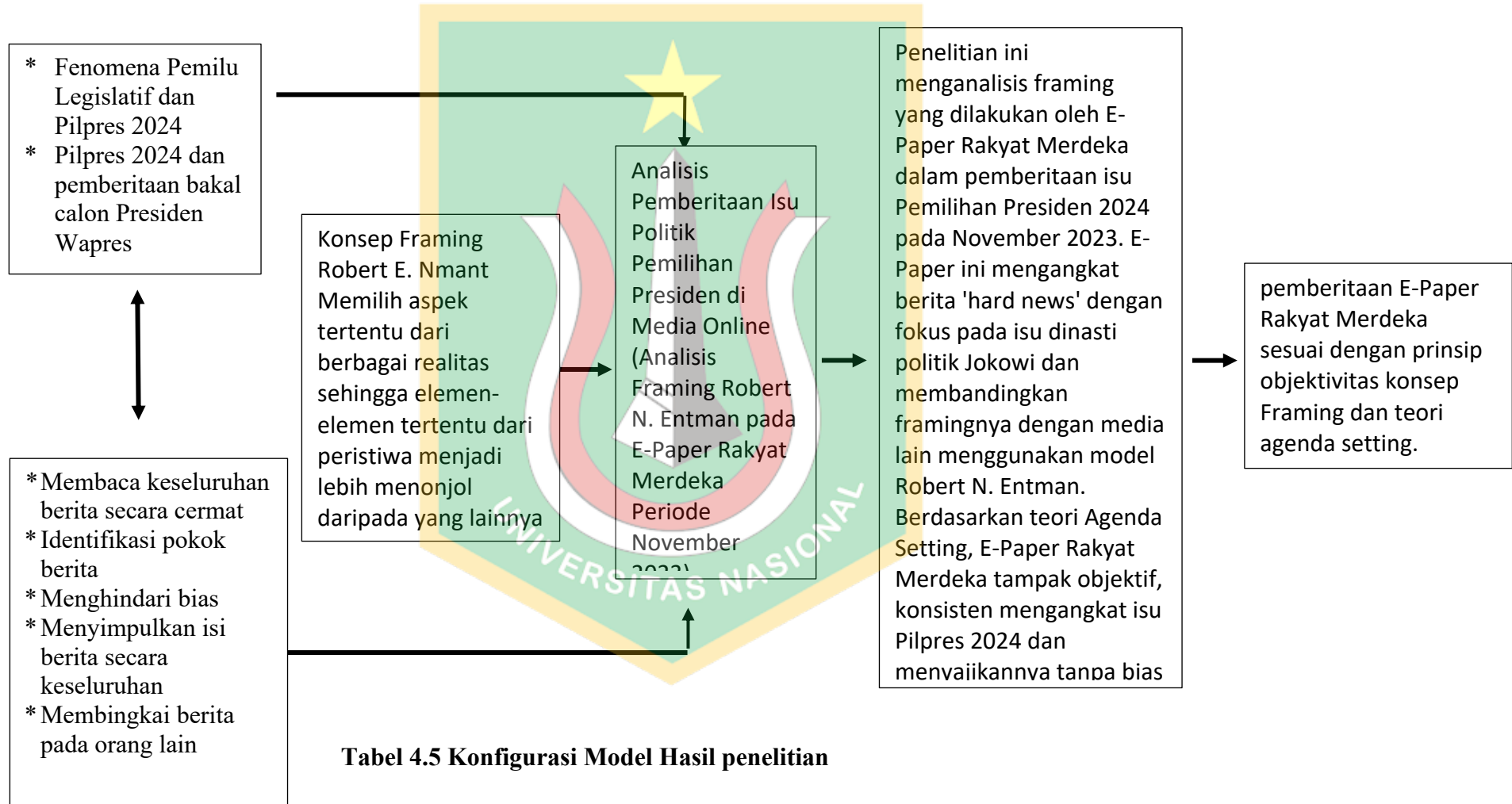
Pada analisis ini, telah dikonfirmasi bahwa pemberitaan E-Paper Rakyat Merdeka tentang isu Pemilihan Presiden 2024 sesuai dengan prinsip-prinsip teori Agenda Setting, yang dimana media memiliki peran dalam membentuk agenda publik dan mempengaruhi opini masyarakat melalui pemilihan dan penyajian berita. Walaupun Objektif, pemberitaan isu Pilpres 2024 tetap sesuai dengan prinsip – prinsip Skema Framing Robert N. Entman dan teori agenda setting. Pendekatan Objektif ini menawarkan cara yang

berbeda dalam mempengaruhi agenda publik dan membentuk diskursus mengenai isu dinasti politik Jokowi.

Selanjutnya diakhir analisis peneliti menyimpulkan bahwasannya E-Paper Rakyat Merdeka memberitakan isu terkait Pilpres 2024 secara objektif dikarenakan motto dari E-Paper itu sendiri yang bertuliskan “The Political News Leader” yang mana menurut peneliti motto tersebut secara tidak langsung mengemban tanggung jawab untuk menyampaikan berita politik secara objektif dan netral.



### 1.4 Konfigurasi Model Hasil Penelitian



Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2024.



